

ANALISIS INTEGRASI PERDAGANGAN ASEAN 5 DALAM SKEMA AFTA

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN**



**DIAJUKAN OLEH
SYAMSUL ARIF
No. Pokok : 049916347**

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

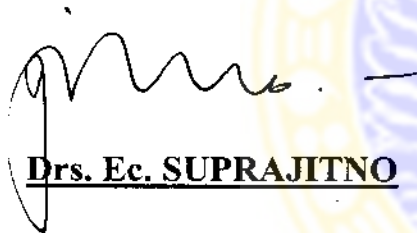


SKRIPSI
ANALISIS INTEGRASI PERDAGANGAN
ASEAN 5 DALAM SKEMA AFTA

DIAJUKAN OLEH:
SYAMSUL ARIF
No. Pokok: 049916347

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,


Drs. Ec. SUPRAJITNO

TANGGAL, 03-10-2007

KETUA PROGRAM STUDI


Dr. Hj. SRI KUSRENI, MSi

TANGGAL, 04-10-2007

ABSTRAK

Integrasi perdagangan regional mampu meningkatkan efisiensi ekonomi dalam kelompok yang berintegrasi melalui penciptaan kompetisi yang lebih ketat diantara anggotanya. Tiap negara anggota terdorong untuk berinovasi dan mengadopsi metode baru dalam berproduksi. Hal itu meningkatkan efisiensi teknis produksinya dengan terus meningkatkan investasi untuk peralatan dan mesin baru. Sebagai hasilnya, ongkos produksi menurun, sedangkan output, lapangan kerja, serta pendapatan meningkat seiring dengan terjadinya ekspansi perdagangan dalam blok perdagangan tersebut (Jhingan, 2001). Melalui hal tersebut ASEAN memandang perlunya membentuk suatu kerjasama perdagangan regional melalui AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). Analisis Integrasi Perdagangan dilakukan dengan sampel data bulanan dari nilai ekspor impor dan nilai tukar, inflasi (CPI) di 5 negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand dan Philipina). Penelitian ini menganalisis ada atau tidaknya integrasi perdagangan berdasarkan Pendekatan Kuantitas dan Pendekatan Harga antara negara-negara dalam blok kerjasama ekonomi regional tersebut dalam skema AFTA dengan menggunakan metode *Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test* untuk pendekatan harga dan persamaan pada penelitian Jong Il-Choe (2001) untuk pendekatan kuantitas. Hasil perhitungan persamaan tersebut menyatakan bahwa ASEAN-5 terintegrasi secara perdagangan, walaupun dengan nilai yang relatif kurang, sedangkan hasil estimasi *ADF test* menunjukkan bahwa secara keseluruhan ASEAN-5 terintegrasi dalam hal perdagangan dan menunjukkan kekuatan integrasi yang cukup baik. Temuan ini konsisten dengan temuan (Laurenceson, 2003) yang menggunakan uji stasioneritas dengan metode yang berbeda (*Philips-Perron Unit Root Test*).

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Sholawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW. Syukur Alhamdulillah dengan ridho-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Integrasi Perdagangan ASEAN 5 Dalam Skema AFTA”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari pihak lain. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Drs. Ec. H. Karjadi Mintaroem, M. S. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
2. Drs. Ec. Suprajitno selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas kesediaan meluangkan waktu dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Dr. Hj. Sri Kusreni, MSi. selaku Ketua Jurusan Ekonomi pembangunan, dan Dra. Ec. Hj Siti Umajah, M, Si. selaku Sekretaris Jurusan.
4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
5. Kedua orang tuaku, Ayahanda Syamsul Hadi dan bundaku tercinta S Mudjiati, serta kedua mertuaku yang telah memberikan segenap kasih sayang dan dukungan moral maupun material. Serta kesabaran yang luar biasa dalam menanti kelulusanku.

6. Istriku tercinta Widia Susan Anggraeny dan buah hatiku Dinara Malika Rifdi yang telah menemani dan memberi semangat dalam pengerjaan skripsi dan melewati masa-masa kuliah di Universitas Airlangga.
7. Kakak-kakakku IESP yang telah memberikan kesempatan untuk belajar darinya. Teman-teman IESP'99 Krisna, Singgih, Marvin, Seto dan adik-adik angkatanku Paul, Prayit, Wahyu, Hari, Iqbal, dll.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas bantuannya.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dengan pahala yang berlipat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, untuk itu penulis memohon maaf dan mengharapkan saran serta kritik yang membangun sehingga dapat berguna bagi penulis maupun bagi pihak lain.

Surabaya, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Sistematika Skripsi.....	5
BAB 2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1. Integrasi Ekonomi.....	7
2.1.1.1. Alasan dibentuknya Integrasi Ekonomi.....	8
2.1.1.2. Keuntungan dan Kerugian dari Integrasi Ekonomi.....	10
2.1.1.3. Tahapan Kebijakan Pembentukan Integrasi Ekonomi.....	13
2.1.1.4. Permasalahan Integrasi Ekonomi.....	15
2.1.2. Integrasi Perdagangan dan <i>Purchasing Power Parity</i> (PPP).....	17
2.1.2.1. <i>Purchasing Power Parity</i>	18
2.1.2.2.1 Kelemahan-Kelemahan PPP.....	22
2.1.2.2. Manfaat integrasi perdagangan regional.....	23
2.2. Penelitian Sebelumnya.....	32
2.3. Hipotesis dan atau Model Analisis.....	34
2.3.1 Model Analisis.....	34
2.3.2 Hipotesis.....	36

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian.....	37
3.2. Identifikasi Variabel.....	37
3.3. Definisi Operasional.....	38
3.4. Jenis dan Sumber data.....	39
3.5. Prosedur Pengumpulan data.....	39
3.6. Teknik Analisis.....	40
3.6.1. Integrasi Perdagangan dengan Pendekatan Kuantitas	40
3.6.2. Integrasi Perdagangan dengan Pendekatan Harga	40
3.6.2.1. <i>Augmented Dickey-Fuller Test</i>	40

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian.....	42
4.1.1. Gambaran Umum Subyek: Sejarah dan Perkembangan ASEAN	42
4.1.1.1. Maksud dan tujuan Dibentuknya ASEAN.....	44
4.1.1.2. Keanggotaan ASEAN	46
4.1.2. Gambaran Umum Obyek : Perdagangan Intra-ASEAN	47
4.1.2.1. Kerjasama Ekonomi Intra ASEAN	51
4.1.2.1.1 <i>Agreement on ASEAN Preferential Trading</i> <i>Arrangement</i>	51
4.1.2.1.2 Persetujuan ASEAN <i>Free Trade Area</i> dan Skema CEPT	52
4.1.2.1.3 Jadwal pelaksanaan AFTA dan perkembangannya	54
4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	59
4.3. Analisis Model dan Pengujian Hipotesis.....	61
4.3.1. Integrasi Perdagangan dengan Pendekatan Kuantitas	61
4.3.2. Integrasi Perdagangan dengan Pendekatan Harga	64

4.3.2.1 <i>Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test</i>	64
4.4. Pembahasan.....	66
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran.....	71
Daftar Kepustakaan.....	73
Lampiran.....	76



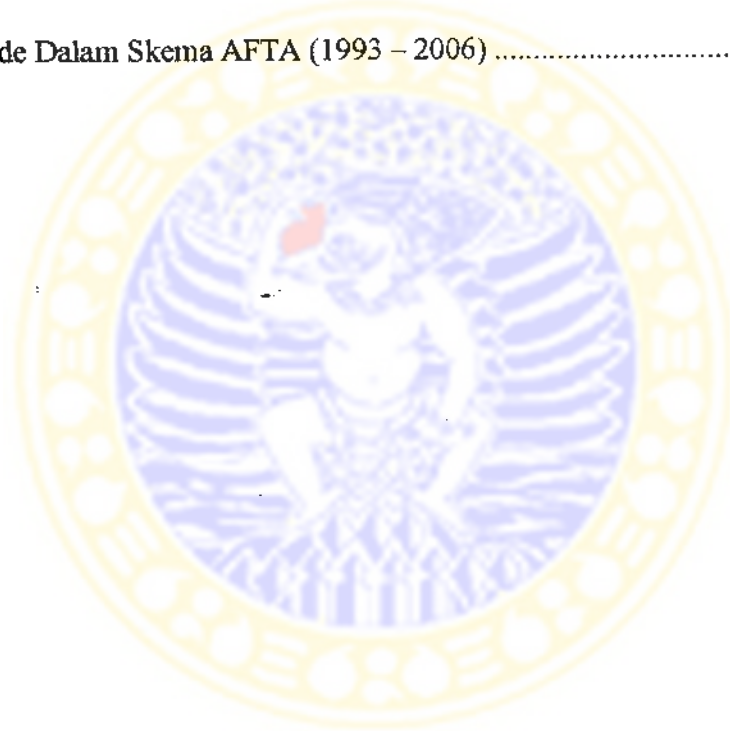
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rata-rata Tarif AFTA Menurut Negara Anggota (%).....	49
Tabel 4.2. Persentase Keterbukaan Perdagangan ASEAN 5 Terhadap ASEAN Periode Dalam Skema AFTA (1993 – 2006).....	62
Tabel 4.3. ADF <i>Test</i> Deviasi Depresiasi Kurs dan Diferensial Inflasi ASEAN 5 Periode Setelah Persetujuan APT: 2000 – 2006	65



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Efek TC dari pembentukan FTA	28
Grafik 2.2. Efek TD dari Pembentukan FTA	26
Grafik 4.1. Pertumbuhan Rasio Perdagangan Intraregional dari beberapa Subregional di Asia: tahun 1980-2000.....	49
Grafik 4.2. Trend Keterbukaan Perdagangan ASEAN 5 Terhadap ASEAN Periode Dalam Skema AFTA (1993 – 2006)	67



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, hampir semua negara di dunia menganut sistem ekonomi terbuka, yang masing-masing negara melakukan hubungan dengan negara lain, antara lain melalui hubungan perdagangan internasional. Makin eratnya integrasi perdagangan akan membawa banyak manfaat. Berdasarkan teori keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa semua negara bisa memetik manfaat dengan melakukan spesialisasi dan pembagian kerja internasional, maka dapat dikatakan bahwa perdagangan bebas yang mampu menguntungkan semua pihak, dan hanya perdagangan yang dijalankan secara bebas dan terbuka yang memungkinkan setiap negara mengembangkan kapasitas produksi dan konsumsinya, yang pada gilirannya akan meningkatkan standar hidup dunia secara keseluruhan (Samuelson, 1992).

Integrasi perdagangan dan keterbukaan ekonomi juga memberikan akses pada ilmu-ilmu pengetahuan bagi negara berkembang, dan menciptakan iklim kompetisi yang lebih ketat (Carbaugh, 2002). Kompetisi sangat penting bagi terjadinya inovasi dan produksi yang efisien. Lebih jauh lagi, kompetisi internasional memaksa produsen domestik untuk tetap bertahan dengan memberi dorongan yang kuat untuk memperbaiki kualitas produk-produknya agar tidak kalah bersaing dengan produsen asing.

Menyadari bahwa ketergantungan perekonomian dunia sangat kompleks dan memiliki efek yang berbeda-beda, langkah-langkah untuk mencapai kerjasama internasional telah banyak dilakukan, sehingga dapat mempererat hubungan antara negara-negara industri dengan negara-negara berkembang. Kerjasama regional dapat merupakan mekanisme perantara atau batu loncatan ke arah integrasi dengan ekonomi dunia atau proses globalisasi (*open regionalism*). Demikian sebaliknya, kerjasama regional merupakan penangkal terhadap tekanan persaingan globalisasi (*resistence to global market*) (Budhi, 2006). Selain itu kerjasama regional juga dapat merupakan cara untuk mendorong pembangunan (*developmental regionalism*) (Tambunan, 2004). Dalam semua ini kerjasama dilaksanakan dengan harapan lebih besarnya dorongan atau penarik bagi investasi dari dalam maupun luar anggota.

Kerjasama ekonomi regional untuk mewujudkan integrasi ekonomi internasional dapat dilihat melalui pembentukan kerjasama regional seperti NAFTA, EMU, APEC. Salah satu upaya negara-negara sedang berkembang di Asia Tenggara dalam mempersiapkan diri menghadapi perdagangan bebas dunia, yaitu melakukan integrasi regional dengan negara-negara anggota ASEAN yang terbentuk dalam *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-4 di Singapura pada awal tahun 1992 yang diprakarsai oleh 6 negara ASEAN yaitu Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Vietnam bergabung pada tahun 1995 dan diikuti oleh Laos, Myanmar, dan Kamboja. Adapun tujuan AFTA secara eksternal adalah untuk meningkatkan intensitas perdagangan intra ASEAN di pasar internasional, sedangkan secara internal

adalah mengurangi kesenjangan antar negara dalam wilayah kerja sama tersebut. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka disepakati *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yaitu bertujuan untuk meningkatkan kegiatan perdagangan melalui pemberian tarif preferensi kepada produk-produk yang sama hasil produksi negara anggota ASEAN (Tambunan, 2004)

Dengan semakin terbukanya perekonomian global, ASEAN yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian terbuka kecil akan menjadi semakin rentan terhadap shock dari luar, sedangkan tidak dapat dipungkiri bahwa ASEAN sangat bergantung pada integrasi regional antara negara-negara anggotanya. Oleh karena itu AFTA diharapkan akan mengurangi resiko tersebut mengingat meningkatnya keterbukaan ekonomi secara terbatas dalam banyak kasus juga membantu mengatasi guncangan ekonomi dalam negeri (Carbaugh, 2002).

Skripsi ini akan meneliti apakah negara-negara anggota ASEAN terintegrasi secara perdagangan dalam skema AFTA dengan pendekatan kuantitas dan pendekatan harga. Pertanyaan tersebut menarik untuk dijawab karena tes mengenai integrasi perdagangan intra-ASEAN, khususnya dengan membandingkan atau menyertakan antara pendekatan kuantitas dan pendekatan harga masih sedikit jumlahnya. Selain itu tes mengenai integrasi perdagangan antar anggota ASEAN penting untuk melihat implikasi AFTA karena besar atau kecilnya manfaat liberalisasi melalui pembentukan AFTA dapat ditentukan dari apakah antara negara-negara anggota ASEAN relatif terintegrasi perdagangan atau tidak (Laurenceson, 2003). Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini bertujuan untuk melakukan tes mengenai

keberadaan integrasi perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan evaluasi awal mengenai manfaat pembentukan AFTA bagi negara-negara anggota ASEAN.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah 5 negara utama ASEAN terintegrasi secara perdagangan berdasarkan pendekatan kuantitas (*quantity Approach*) dalam skema AFTA?
2. Apakah 5 negara utama ASEAN terintegrasi secara perdagangan berdasarkan pendekatan harga (*Price Approach*) dalam skema AFTA?
3. Negara manakah di antara 5 negara utama ASEAN yang saling terintegrasi secara perdagangan dalam skema AFTA?

1.2 Tujuan Penelitian

Memperhatikan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Integrasi perdagangan Intra-ASEAN dalam skema AFTA berdasarkan pendekatan kuantitas.
2. Integrasi perdagangan Intra-ASEAN dalam skema AFTA berdasarkan pendekatan harga.
3. Negara-negara mana diantara ASEAN 5 yang saling terintegrasi dalam hal perdagangan.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah: untuk memahami dan mendalami masalah di bidang ekonomi internasional, khususnya mengenai integrasi perdagangan intra-ASEAN.
2. Manfaat praktis: sebagai referensi bagi pembaca atau peneliti lain yang tertarik/berkepentingan dalam bidang ekonomi dan internasional.
3. Manfaat kebijakan: menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan strategi kebijakan yang akan ditempuh agar memperoleh manfaat maksimal dari pembentukan kerjasama perdagangan intra-ASEAN.

1.4 Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini mengemukakan tentang latar belakang masalah, permasalahan yang menjadi dasar penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi

Bab 2: Tinjauan Kepustakaan

Bab ini akan menguraikan konsep dan teori integrasi perdagangan intra-ASEAN. Bab ini juga akan memaparkan penelitian-penelitian yang pernah

dilakukan sebelumnya. Selanjutnya diuraikan pula hipotesis dan model analisis yang akan digunakan berdasarkan latar belakang masalah.

Bab 3: Metode Penelitian

Bab ini mengemukakan tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas secara rinci tentang analisis data yang digunakan dalam penelitian, pembahasan mengenai analisis menggunakan model disertai dengan penghitungan dan pembuktiannya. Bab ini juga akan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan hasil penghitungan dan landasan teori yang relevan.

Bab 5: Simpulan dan Saran

Bab ini mengemukakan kesimpulan penelitian sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang sesuai dengan hasil pembahasan serta saran yang diharapkan dapat berguna.

BAB 2

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Integrasi Ekonomi

Integrasi ekonomi adalah penggabungan dari dua atau lebih ekonomi nasional menjadi sebuah kesatuan multinasional ekonomi dalam satu wilayah tertentu.¹ Terciptanya beberapa integrasi ekonomi akan mendorong terciptanya pasar global yang efisien dan menguntungkan bagi semua pelakunya. Integrasi Ekonomi Internasional terdiri dari integrasi perdagangan, yaitu hubungan perdagangan barang dan jasa antar dua negara atau lebih, serta integrasi keuangan yaitu hubungan yang berkaitan dengan investasi langsung maupun tidak langsung antar dua negara atau lebih (Nopirin, 1999).

Derajat integrasi ekonomi dari suatu negara dalam perekonomian dunia (derajat keterbukaan) dapat dilihat dari dua indikator utama. Pertama, rasio dari perdagangan internasional (ekspor dan impor) dari negara tersebut sebagai suatu persentase dari jumlah nilai atau volume perdagangan dunia, atau besarnya nilai perdagangan luar negeri dari negara itu sebagai suatu persentase dari PDB-nya. Semakin tinggi rasio tersebut menandakan semakin terbuka perekonomian negara tersebut. Sebaliknya, semakin tertutup negara tersebut, maka semakin kecil rasio

¹ Ingo, Walter ,*International Economics*, The Ronald Press Company, New York, Tahun 1975, hal 207-208

tersebut. Kedua, kontribusi negara tersebut dalam pertumbuhan investasi dunia, baik investasi langsung atau jangka panjang (penanaman modal asing atau PMA) maupun investasi tidak langsung atau jangka pendek (investasi portofolio) (T. Tambunan, 2004).

Karakteristik Integrasi Ekonomi menurut Ingo Walter¹ adalah:

1. Perdagangan bebas untuk barang dan jasa di antara negara-negara anggota.
2. Pergerakan yang bebas untuk tenaga kerja dan kapital di antara negara-negara anggota.
3. Mobilitas yang bebas untuk perusahaan, termasuk hak untuk menyelenggarakan cabang-cabangnya di luar negeri
4. Kesatuan daerah bisnis sesuai dengan negara-negara yang terintegrasi
5. Kebijakan negara yang sesuai/harmonis yang dapat mempengaruhi perputaran dari barang, jasa, tenaga kerja dan kapital di masing-masing negara.
6. Menyamakan kebijaksanaan pemerintah dalam hubungan ekonomi antar negara anggota dan bukan anggota.
7. Menyamakan kebijaksanaan moneter dan fiskal, termasuk penyamaan pajak tidak langsung.
8. Koordinasi kebijaksanaan ekonomi dan sosial lainnya, termasuk program pembangunan regional, keamanan sosial, kebijaksanaan pertanian dan lain sebagainya.

2.1.1.1 Alasan dibentuknya Integrasi Ekonomi

Ada banyak keuntungan dari integrasi regional. Berikut ini manfaat bagi negara-negara anggota ketika mereka bergabung dalam suatu blok perdagangan, atau suatu *custom union*, atau suatu wilayah perdagangan bebas (*free trade area*) menurut Jhingan²:

¹ Walter, Ingo. 1975. *International Economics*, The Ronald Press Company, New York

² Jhingan, M.L. 2001. *International Economics*, Fifth Revised and Enlarge Edition, Delhi: Vrinda Publication (P) LTD, India.

1. Integrasi Ekonomi mendorong pengalokasian sumber daya yang lebih baik antar negara-negara anggota, yaitu dari penggunaan yang kurang efisien ke arah penggunaan yang lebih efisien, dan pada akhirnya dapat memperbesar manfaat perdagangan.
2. Integrasi Ekonomi meningkatkan kualitas dan kuantitas faktor produksi sebagai akibat adanya perubahan teknologi dan *capital inflow*.
3. Integrasi Ekonomi meningkatkan produksi melalui penciptaan spesialisasi yang didasarkan pada keunggulan komparatif sehingga barang-barang yang diproduksi oleh produsen/negara berbiaya tinggi dapat digantikan oleh produsen/negara berbiaya rendah.
4. Integrasi Ekonomi mendorong pencapaian skala ekonomi yang lebih besar dan menghasilkan jumlah output yang lebih tinggi. Pencapaian skala ekonomi tersebut dimungkinkan dengan adanya persetujuan antar negara yang berintegrasi untuk mendirikan industri manufaktur baru dan memperluas industri manufaktur yang sudah ada. Jenis industri yang akan didirikan dan di negara mana industri tersebut akan dikembangkan dapat dianalisis berdasarkan kepemilikan faktor (*endowment factor*) antar negara dengan disertai suatu studi kelayakan terperinci terhadap manfaat dan biaya sosial.
5. Integrasi Ekonomi meningkatkan volume perdagangan antar negara anggota dengan dihapuskannya hambatan perdagangan. Contohnya di Negara-negara sedang berkembang yang mempunyai pola dan tingkat konsumsi yang mirip dengan satu sama lain (khususnya dalam satu region), sehingga perjanjian

perdagangan regional antar negara-negara tersebut menyediakan peluang yang lebih besar untuk memperluas pasar mereka.

2.1.1.2 Keuntungan dan Kerugian dari Integrasi Ekonomi

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari suatu negara yang melakukan integrasi dengan negara lain menurut Jhingan adalah sebagai berikut:

1. Integrasi Ekonomi mempererat hubungan perdagangan antara kelompok regional dan negara-negara lain di seluruh dunia dengan memperkuat *bargaining position* masing-masing pihak.
2. Integrasi Ekonomi meningkatkan efisiensi ekonomi dalam kelompok yang berintegrasi melalui penciptaan kompetisi yang lebih ketat diantara anggotanya. Tiap negara anggota terdorong untuk berinovasi dan mengadopsi metode baru dalam memproduksi. Hal itu meningkatkan efisiensi teknis produksinya dengan terus meningkatkan investasi untuk peralatan dan mesin baru. Sebagai hasilnya, ongkos produksi menurun, sedangkan output, tenaga kerja, serta pendapatan meningkat seiring dengan terjadinya ekspansi perdagangan dalam blok perdagangan tersebut.
3. Integrasi Ekonomi meningkatkan mobilitas faktor produksi antar negara-negara anggota, seperti mendorong masuknya investasi asing langsung ke dalam industri berbasis lokal yang mampu mencapai skala ekonomi.
4. Negara-negara anggota mendapatkan keuntungan dari terciptanya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.

5. Standard hidup masyarakat negara-negara anggota meningkat seiring dengan meningkatnya ketersediaan produk dengan harga yang lebih murah, meningkatnya peluang bagi tenaga kerja, dan meningkatnya pendapatan.
6. Negara anggota bisa mencapai target ekonominya seperti kesempatan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi tinggi, serta pemerataan.

Selain keuntungan, negara-negara yang melakukan integrasi juga khawatir akan kemungkinan dampak buruk yang mungkin terjadi. Dalam praktiknya, keterbukaan perekonomian menyebabkan timbulnya saling ketergantungan antar negara. Perubahan kebijakan di suatu negara dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi di negara-negara lain. Misalnya ketika suatu negara menaikkan belanja pemerintah, pendapatan negara tersebut naik dan sebagian dari kenaikan itu akan dibelanjakan untuk impor, yang artinya pendapatan negara-negara asal impor tersebut di luar negeri akan naik juga. Kenaikkan pendapatan luar negeri kemudian akan menaikkan permintaan luar negeri atas barang-barang negara tersebut, yang akhirnya akan membuat ekspansi pendapatan domestik yang dihasilkan dari pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi. Efek *reperkusi* (*repercussion effect*) ini dalam prakteknya menjadi penting. Ketika suatu negara melakukan ekspansi, hal tersebut memungkinkan menarik sebagian dunia lainnya untuk melakukan ekspansi. Demikian juga, bila dunia melakukan ekspansi, maka negara tersebut juga dapat terimbas ekspansi pula (Dornbusch, 2004).

2.1.1.3 Tahapan Kebijakan Pembentukan Integrasi Ekonomi

Tingkatan atau tahapan dalam kebijakan menuju integrasi ekonomi itu sendiri bervariasi mulai dari pengaturan perdagangan preferensial, yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi pembentukan kawasan atau area perdagangan bebas, kemudian menjadi persekutuan pabean, pasaran bersama dan akhirnya akan menjurus pada penyatuan (uni) ekonomi secara menyeluruh berikut tahapan dalam kebijakan menuju integrasi ekonomi menurut Salvatore, 1997:

1. Pengaturan Perdagangan Preferensial (*Preferential Trade Arrangements*) dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan yang berlangsung di antara mereka, dan membedakannya dengan yang diberlakukan terhadap negara-negara luar yang bukan merupakan anggota. Ini merupakan bentuk integrasi ekonomi yang paling longgar. Contohnya yang terbaik adalah Skema Preferensi Persemakmuran Inggris (*British Commonwealth Preference Scheme*) yang dibentuk pada tahun 1932 oleh Kerajaan Inggris. Keanggotaannya meliputi wilayah-wilayah di bawah kekuasaannya dan sebagian bekas daerah koloni atau jajahannya.
2. Sedangkan Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*) adalah bentuk integrasi ekonomi yang lebih tinggi dimana semua hambatan perdagangan tarif maupun non tarif diantara negara-negara anggota telah dihilangkan sepenuhnya, namun masing-masing negara anggota tersebut masih berhak untuk menentukan sendiri apakah mereka hendak mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap

negara-negara luar yang bukan anggota. Contoh terbaik kawasan perdagangan bebas ini adalah asosiasi perdagangan bebas Eropa (EFTA, *European Free Trade Assosiation*) yang didirikan pada tahun 1960 oleh Inggris, Austria, Denmark, Norwegia, Portugal, Swedia dan Swiss (Finlandia kemudian bergabung dan menjadi anggota penuh pada tahun 1961). Contoh kelembagaan area atau perdagangan bebas yang terbaru adalah perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA, *North American Free Trade Agreement*), yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Kanada dan Mexico pada tahun 1993.

3. Sedangkan bentuk integrasi ekonomi berikutnya, yakni Persekutuan Pabean (*Custom Union*), mewajibkan semua anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan diantara mereka namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara-negara luar yang bukan anggota. Jadi, masing-masing negara anggota tersebut tidak lagi bebas menentukan sendiri kebijakan komersialnya dengan negara-negara lain. Jika tarif diperlakukan, maka semua negara harus mengikutinya. Demikian pula sebaliknya, jika terhadap negara-negara tertentu diputuskan untuk membebaskan perdagangan dari berbagai macam hambatan, maka semua negara anggota harus melakukannya pula. Harmonisasi kebijakan perdagangan ini merupakan ciri utama persekutuan pabean. Contohnya yang paling terkenal adalah Uni Eropa (*European Union*, EU) atau yang semula lebih dikenal sebagai Pasar Bershima Eropa (*European Common Market*).

Cikal bakal Uni Eropa itu sendiri dibentuk pada tahun 1957 oleh Jerman Barat, Perancis, Italia, Belgia, Belanda, dan Luxemburg. Contoh lainnya adalah *Zollverein* (artinya setara dengan persekutuan pabean) yang dibentuk pada tahun 1834 oleh sejumlah negara merdeka yang kini menjadi negara-negara bagian Jerman. Kenyataan bahwa wilayah-wilayah tersebut kini bersatu menjadi sebuah negara ternyata berawal dari persekutuan pabean tersebut, yang kemudian diresmikan oleh Kanselir Count Otto Von Bismark sebagai satu unit politik tunggal bernama Jerman pada tahun 1870.

4. Pada tahap berikutnya, integrasi ekonomi tersebut menjelma menjadi Pasaran Bersama (*common market*). Pada bentuk integrasi ekonomi ini, bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan, namun juga arus-arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Itu berarti seorang pekerja di salah satu negara bisa bepergian ke negara yang menjadi anggota pasaran bersama itu untuk memperoleh lapangan kerja secara bebas seperti halnya ia melakukannya di negaranya sendiri. Uni Eropa telah mencapai status pasaran bersama itu pada akhir tahun 1992.
5. Pada tingkatan tertinggi dari integrasi ekonomi, yakni Uni Ekonomi (*Economic Union*), harmonisasi atau penyelarasan itu dilakukan lebih jauh, bahkan dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota. Ini merupakan tipe kerja sama ekonomi yang paling tinggi. Tahap ini tentu tidak mudah dilakukan karena memerlukan persyaratan, diantaranya yaitu kesamaan dalam faktor-faktor yang

mempengaruhi stabilitas moneter pada umumnya dan nilai mata uang pada khususnya, seperti tingkat inflasi dan suku bunga serta defisit keuangan pemerintah. Pemerintah dari masing-masing negara anggota harus menjaga agar pertumbuhan dari faktor-faktor tersebut tidak diluar batas yang telah ditetapkan. Contoh yang sudah sampai tahap ini adalah Uni Eropa (UE), UE yang mendirikan Bank Sentral Eropa dan menggantikan bank-bank sentral nasional serta mengeluarkan mata uang tunggal Euro yang menggantikan mata uang-mata uang nasional, berikutnya contoh uni ekonomi dan moneter yang benar-benar menyeluruh adalah Amerika Serikat. Masing-masing negara bagian memperlakukan negara bagian lain tidak ubahnya dengan dirinya sendiri.

2.1.1.4 Permasalahan Integrasi Ekonomi

Selain manfaat, suatu wadah integrasi ekonomi regional seperti *custom union* atau wilayah perdagangan bebas juga memiliki banyak hambatan dalam pembentukannya. Hambatan tersebut menurut Jhingan, 2001, antara lain adalah:

1. Politis. Dalam integrasi regional manapun, selalu ada negara berkembang besar dan kecil, serta negara yang lebih berkembang. Negara berkembang kecil, negara-negara terbelakang dan lebih lemah, takut bahwa kedaulatan dan kebebasan mereka akan berada dalam bahaya jika mereka membentuk suatu *custom union* dengan negara tetangga mereka yang lebih besar dan lebih kuat.

Ini terjadi terutama di Asia dan Afrika karena di daerah tersebut masih terdapat perselisihan batas dan persaingan nasional.

2. **Administratif.** Ada persyaratan administratif tertentu dari suatu *custom union* yang mungkin di luar kapasitas anggota yang lemah dan miskin, seperti tidak mempunyai jumlah staf administratif yang cukup dan efisien untuk menerapkan kebijakan dari *custom union* itu.
3. **Distribusi keuntungan yang tidak seimbang.** Perbedaan tingkat pembangunan antar negara dapat menciptakan permasalahan dalam distribusi keuntungan karena timbul ketakutan di negara-negara yang lemah bahwa negara-negara mitra yang lebih kuat justru akan memperlambat dan bukannya membantu pembangunan ekonomi mereka. Mereka, oleh karena itu, segan untuk membentuk *custom union* dengan negara-negara terbelakang tersebut.
4. **Jarak geografis.** Kedekatan jarak antar satu sama lain sangat penting bagi pembentukan suatu *custom union* yang baik. Meskipun ada perjanjian geografis antar negara-negara tersebut, keterbatasan dalam transportasi, komunikasi, infrastruktur, dan fasilitas lain untuk perdagangan intra-regional akan memperlambat terciptanya manfaat yang maksimal.
5. **Trade Diversion.** Volume perdagangan luar negeri negara berkembang, sebagai presentase dari produksi domestiknya, secara umum relatif tinggi. Tetapi volume perdagangan intra-regional sangat kecil jika dilihat sebagai presentase dari total perdagangan luar negeri regional. Hal ini akan menyebabkan tidak efektifnya pembentukan *custom union* karena negara-

negara anggotanya sendiri tidak melakukan aktifitas perdagangan yang intensif dengan satu sama lain, melainkan cenderung berdagang dengan negara-negara di luar kawasan kerjasama regional ini.

2.1.2 Integrasi Perdagangan dan *Purchasing Power Parity*

Integrasi perdagangan ialah penyatuan pasar barang dan jasa (*goods and services*) antar kedua negara, penyatuan pasar ini terjadi melalui perdagangan internasional barang dan jasa antar negara baik dalam bentuk ekspor maupun impor (Rumayya, 2004). Semakin terbuka perdagangan suatu negara terhadap negara lain maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut semakin terintegrasi secara perdagangan dengan negara lain.

Perdagangan antar negara terjadi karena dimungkinkannya untuk memperoleh keuntungan yang disebabkan oleh perbedaan harga, yakni dapat membeli barang yang harganya lebih rendah dan mungkin dapat menjual keluar negeri dengan harga yang relatif tinggi. Harga sangat ditentukan oleh biaya produksi, yang terdiri dari upah, biaya modal, sewa tanah, biaya bahan mentah serta efisiensi dalam proses produksi. Untuk menghasilkan suatu jenis barang, antara satu negara dengan negara lain dapat memiliki biaya produksi yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan jumlah, jenis, kualitas serta cara-cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi tersebut dalam proses produksi, yang kemudian menyebabkan perbedaan dalam biaya produksi dan perbedaan harga output produksi (Nopirin, 1999).

Perbedaan harga inilah yang menjadi pangkal timbulnya perdagangan antar negara. Dapat disimpulkan bahwa, bermula dari timbulnya perdagangan antar negara maka integrasi atau penyatuan pasar dapat terjadi. Sebagai salah satu konsekuensi dari penyatuan pasar antar kedua negara tersebut adalah penyatuan harga antar kedua negara. Penyatuan harga ini dapat dijelaskan melalui konsep *Purchasing Power Parity* berikut.

2.1.2.1 *Purchasing Power Parity*

Konsep *law of one price* (dalil satu harga) menyatakan bahwa dalam pasar-pasar kompetitif yang bebas dari biaya transportasi dan hambatan-hambatan resmi terhadap perdagangan (misalnya tarif), barang-barang yang sama jenisnya pasti dijual diberbagai negara dengan harga yang sama, apabila harganya dinyatakan dalam satuan mata uang yang sama (Krugman dan Obstfeld, 2000). Secara formal konsep *law of one price* adalah sebagai berikut:

$$P'_A = (E_{A/B}) \times (P'_B) \quad \dots\dots\dots (1)$$

Persamaan diatas menunjukkan bahwa harga barang *i* pada negara *A* (P'_A), sama dengan nilai kurs antara negara *A* dengan *B* ($E_{A/B}$), dikalikan dengan harga barang yang sama di negara *B* (P'_B). Kemudian dapat diketahui pula melalui persamaan berikut bahwa kurs mata uang antara negara *A* dengan *B* ($E_{A/B}$), merupakan

perbandingan dari harga barang i di negara A (P_A^i), dan harga barang yang sama di negara B (P_B^i):

$$E_{A/B} = P_A^i / P_B^i \quad \dots\dots\dots (2)$$

Sebelumnya telah diuraikan bahwa perbedaan harga domestik memegang peranan penting terciptanya perdagangan antar negara. Dalam jangka panjang, tingkat harga domestik memainkan peranan kunci dalam menentukan besaran kurs maupun harga relatif antar produk perdagangan dari berbagai negara (Van Hoa, 2003). Itu sebabnya perlu diketahui terlebih dahulu maksud sebuah teori mengenai interaksi antara harga dan kurs. Pembahasan teori *Purchasing Power Parity* (PPP) pada intinya menjelaskan bahwa pergerakan kurs antara mata uang dua negara bersumber dari tingkat harga domestik masing-masing negara (Krugman dan Obstfeld, 2000).

Daya beli domestik dari mata uang suatu negara tercermin sepenuhnya pada tingkat harga domestik yang berlaku di negara itu sendiri. Dengan demikian, teori PPP memprediksikan bahwa penurunan daya beli mata uang domestik (ditunjukkan dengan kenaikan tingkat harga domestik) akan diiringi dengan depresiasi mata uang dalam pasar valuta asing. Begitu pula sebaliknya, teori PPP memprediksikan bahwa kenaikan daya beli mata uang domestik akan dibarengi atau disusul dengan apresiasi mata uangnya. Maka PPP memprediksi kurs dengan:

$$E_{A/B} = P_A / P_B \quad \dots\dots\dots (3)$$

Persamaan diatas dirumuskan kembali menjadi:

$$P_A = (E_{A/B}) \times (P_B) \quad \dots\dots\dots (4)$$

Dimana sisi kiri melambangkan harga sekumpulan barang dan jasa (berbeda dengan dalil satu harga yang mengasumsikan satu komoditas) di negara A dengan mata uang A (P_A). Sedangkan sisi kanan melambangkan harga komoditi yang sama di negara B diukur dengan mata uang negara A (yaitu hasil perkalian antara harga mata uang negara B komoditi tersebut (P_B) dengan harga mata uang negara A dari mata uang negara B (E_{AB}).

Namun, hanya ada sedikit alasan untuk berharap bahwa persamaan (3) dapat benar-benar berlaku. PPP absolut sangat tidak masuk akal, kecuali 2 kelompok barang yang harganya dibandingkan dalam persamaan (3) adalah kelompok barang yang sama (tidak ada alasan untuk menganggap bahwa kelompok barang yang berbeda dijual dengan harga yang sama). Selain itu, dalam praktek pemerintah tidak menggunakan standar internasional atas sekelompok komoditi untuk menghitung indeks harga (Koedijk, 2004).

Oleh karena itu, digunakan PPP relatif dalam menghitung indeks harga. PPP relatif menyatakan bahwa persentase perubahan nilai tukar di antara 2 mata uang pada suatu periode sama dengan perbedaan persentase perubahan tingkat harga nasional. PPP relatif di antara negara i dan j dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\left(\frac{E_t^j - E_{t-1}^j}{E_{t-1}^j} \right) = \pi_t^i - \pi_t^j \quad \dots\dots\dots (5)$$

Dimana $\left(\frac{E_t^j - E_{t-1}^j}{E_{t-1}^j} \right)$ adalah perubahan nilai tukar mata uang antara negara i dengan j pada suatu periode. Sedangkan π_t sebagai perubahan tingkat harga ($\pi_t = (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$ adalah perubahan tingkat harga antara waktu t dan $t - 1$).

Namun, kinerja PPP relatif pun sering mengecewakan dikarenakan adanya beberapa faktor. Riset empiris yang dilakukan oleh Mussa tahun 1986 untuk membandingkan penyimpangan jangka pendek dari PPP dalam sistem nilai tukar tetap dan mengambang menemukan bahwa sistem nilai tukar mengambang menyebabkan penyimpangan jangka pendek yang lebih besar dan lebih sering dari PPP relatif. Deviasi dari PPP relatif juga terjadi karena adanya perbedaan harga yang timbul akibat pajak yang berbeda, perbedaan biaya transportasi, praktek monopoli dan hambatan perdagangan (Amrita, 2005).

Balassa dan Samuelson³ mengidentifikasi sebuah faktor penting yang menyebabkan *systematic bias* dalam hubungan antara tingkat harga relatif dan nilai tukar. Sebelum itu, Harrod telah menyimpulkan bahwa *non-tradable goods* berperan sebagai sumber potensial bagi deviasi dari PPP. Berdasarkan klasifikasi standar antara *tradables* dan *nontradables* serta dengan mengasumsikan bahwa *the Law of One Price* hanya berlaku bagi *tradables*, inti dari *Harrod-Balassa-Samuelson hypothesis* menjelaskan bagaimana perbedaan pertumbuhan produktivitas di antara 2 sektor dapat menimbulkan perbedaan inflasi dengan mengubah struktur harga internal. Oleh karena itu, jika perubahan CPI makin besar di antara negara-negara dalam suatu blok ekonomi regional, maka pastilah disebabkan oleh perbedaan evolusi harga *non-traded goods* (Krugman dan Obstfeld, 2000).

³ Bela Balassa, 1964, "The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal" dan Paul Samuelson, 1964, "Theoretical Notes on Trade Problems" telah menyajikan referensi untuk diskusi mengenai PPP, nilai tukar, dan perbandingan harga antar negara.

Pada sisi permintaan, faktor-faktor yang berjangka lebih pendek juga dapat menimbulkan perbedaan inflasi. Divergensi siklis mengarah pada perbedaan harga *non-traded goods* (khususnya perumahan dan jasa) di antara negara-negara. Kebijakan fiskal yang berbeda juga memiliki implikasi serupa. Sebagai contoh, Froot dan Rogoff (1991) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang lebih besar pada barang dalam negeri akan meningkatkan harga relatif dan menurunkan produktivitas relatif (Krugman dan Obstfeld, 2000).

2.1.2.1.1 Kelemahan-Kelemahan PPP

Menurut Krugman dan Obstfeld (2000), ada beberapa kelemahan dari logika fundamental yang terkandung di dalam teori PPP mengenai kurs yang didasarkan pada konsep *law of one price* tersebut:

1. Asumsi yang dianut oleh konsep *law of one price*, yakni bahwa biaya-biaya transportasi dan pembatasan perdagangan bisa diabaikan, ternyata dalam prakteknya tidak dapat diabaikan.
2. Praktek-praktek monopolistik dan oligopolistik di berbagai pasar barang, bersama dengan besarnya aneka biaya transportasi serta pembatasan perdagangan, semakin memperlemah keterkaitan harga atas barang yang sama di berbagai negara.
3. Karena data-data inflasi di berbagai negara didasarkan pada jenis komoditi acuan yang berlainan, maka perubahan kurs tidak bisa diharapkan mampu

mengimbangi selisih inflasi resmi (yang dilaporkan pihak pemerintah), biarpun tidak ada pembatasan perdagangan dan semua produk bisa diperdagangkan.

2.1.2.2. Manfaat integrasi perdagangan regional

1. Manfaat bagi Negara anggota

Munculnya integrasi-integrasi perdagangan regional seperti ASEAN, UE, NAFTA, dan lainnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan volume perdagangan (dan kerja sama ekonomi) antar negara lewat penerapan sistem GATT/WTO. Hanya perbedaannya, sistem perdagangan bebas di dalam suatu blok perdagangan regional hanya diterapkan di dalam wilayahnya, tidak dengan negara yang bukan anggotanya. Misalnya AFTA, hanya untuk negara-negara anggota ASEAN.

Perdagangan bebas adalah suatu konsep ekonomi yang dapat dikatakan pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith, dimana lalu lintas transaksi perdagangan antar negara dilakukan secara bebas tanpa hambatan apapun juga. Adam Smith percaya bahwa sistem perdagangan bebas pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat karena dengan sistem itu setiap negara dapat memanfaatkan semua sumber daya produksi yang dimiliki secara optimal. Menurut Tambunan (2004) ada 4 keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh oleh negara-negara anggota dalam suatu blok perdagangan regional dengan menerapkan perdagangan bebas tanpa hambatan antar negara, yakni sebagai berikut:

1. Setiap negara anggota akan memproduksi komoditi yang paling menguntungkan negara tersebut berdasarkan pada faktor-faktor keunggulan yang dimilikinya. Jika masing-masing negara anggota melakukan spesialisasi pada komoditi yang berbeda, maka akan mendorong timbulnya spesialisasi regional dalam beragam macam produksi, atau memungkinkan suatu derajat yang lebih besar dari spesialisasi bagi setiap negara anggota. negara yang paling efisien dalam berproduksi dan mempunyai produktivitas yang tinggi akan mendapatkan manfaat yang paling besar dari konsep perdagangan bebas.
2. Pasar internal yang besar memungkinkan setiap negara anggota melakukan produksi massa, sesuai keunggulan masing-masing, hingga mencapai titik optimal atau skala ekonomis, yang berarti penurunan biaya produksi. Dengan demikian, output yang dihasilkan dapat dipasarkan dengan harga lebih murah dibandingkan hasil produksi dengan skala yang lebih kecil karena pasar kecil. Jadi setiap negara anggota bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah di pasar internal.
3. Tidak hanya volume pasar regional meningkat, tetapi perdagangan bebas juga memperbanyak aneka ragam komoditi (diversifikasi produk) yang diperdagangkan antarnegara anggota, baik produk-produk konsumen maupun produsen. Hal ini membuat masyarakat dan pengusaha di kawasan tersebut mempunyai pilihan yang lebih banyak, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada volume maupun diversifikasi produksi dan peningkatan kesejahteraan di kawasan tersebut.

4. Dengan peningkatan volume perdagangan antarnegara anggota, maka dengan sendirinya volume produksi dan juga kesempatan kerja di masing-masing negara meningkat. Pada akhirnya, seperti yang dipercaya Adam Smith, sistem perdagangan bebas akan meningkatkan kesejahteraan di negara-negara yang berpartisipasi secara penuh.

Selain itu, menurut Jhingan (2001), kawasan perdagangan bebas atau pasar bersama regional juga memberikan keuntungan-keuntungan lainnya, yakni seperti berikut:

1. Sebagai negara produsen hasil bumi dan tambang terutama untuk ekspor, seperti misalnya Indonesia dan Malaysia bisa bekerja sama di dalam pemasaran dari hasil bumi dan tambang tersebut untuk memperkuat posisi tawar-menawar Indonesia dan Malaysia menghadapi negara-negara kuat sebagai konsumen (misalnya AS, Jepang, dan UE)
2. Dengan adanya pasar bersama bisa dibentuk suatu *marketing board* untuk produk-produk ekspor yang sama (misalnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk karet) untuk bertindak selaku penjual tunggal ke negara-negara di luar kawasan (misalnya ASEAN). Selain itu, juga ada kemungkinan bisa dibentuk *central purchasing board* yang bertindak sebagai pembeli tunggal untuk barang-barang impor yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara anggota. Dengan cara ini dapat dihindari persaingan yang tidak sehat, baik selaku Negara penjual maupun Negara pembeli.
3. Kemungkinan kerja sama tidak hanya di bidang ekonomi (misalnya produksi dan investasi), tetap juga di bidang-bidang lain seperti teknologi dan ilmu

pengetahuan, inovasi dalam proses produksi maupun produk) budaya, dan sosial.

4. Pasar bersama memberi kemungkinan untuk persaingan regional yang akan mendorong efisiensi dan produktifitas.

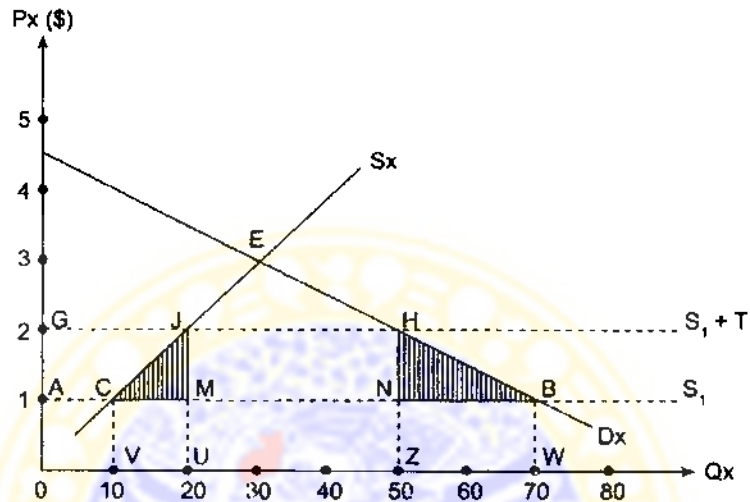
Selain itu, efek dari pembentukan suatu integrasi perdagangan regional, baik dalam tahap pertama (PTA) maupun pada tahap-tahap selanjutnya (FTA atau CU), bagi negara-negara anggota dapat dibedakan antara efek statis dan dinamis. Efek – efek dinamisnya adalah seperti (sebagian telah disebutkan diatas) produksi dapat mencapai skala ekonomis, pemanfaatan eksternal ekonomis secara optimal, perubahan teknologi atau teknik produksi, dan peningkatan investasi. Efek-efek dinamis, termasuk efek yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang berpartisipasi di dalam suatu FTA.

2. Manfaat bagi Negara Non-anggota

Dalam integrasi perdagangan regional, tarif internal antar negara anggota dihapuskan, sementara tarif eksternal antara negara anggota dengan mitra dagangnya non-anggota tetap dipertahankan. Perbedaan antara tarif internal dan tarif eksternal ini bisa di satu pihak menciptakan perdagangan antar negara anggota (yang sebelumnya mereka tidak saling berdagang satu dengan lainnya karena masih ada hambatan bea impor), disebut efek penciptaan perdagangan *trade creation* (TC), tetapi di pihak lain, mengorbankan perdagangan antara negara anggota dengan negara non-anggota, disebut efek pergeseran perdagangan *trade diversion* (TD). Kedua efek ini dijelaskan lebih mendalam di bawah ini sebagai berikut (Salvatore, 1997):

- *Trade Creation (TC)*

Kreasi perdagangan (*trade creation*) terjadi apabila sebagian produksi domestik di suatu negara yang menjadi anggota perserikatan pabean atau dari negara luar yang bukan anggota digantikan oleh impor yang harganya lebih murah (artinya produksinya lebih efisien) dari negara anggota lainnya. Berdasarkan asumsi bahwa segenap sumber daya ekonomi telah terkerahkan secara penuh (*full employment*), maka pembentukan perserikatan pabean yang menciptakan dampak seperti itu akan meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota secara keseluruhan karena hal tersebut akan mengarah pada peningkatan spesialisasi produksi yang didasarkan pada keuntungan komparatif. Di samping itu, kreasi perdagangan yang bersumber dari pembentukan perserikatan pabean juga akan meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang bukan anggota karena kenaikan pendapatan riil di antara negara-negara anggota perserikatan pabean itu (yang bersumber dari meningkatnya spesialisasi dan efisiensi produksi di antara mereka) cepat atau lambat akan mengimbas ke negara-negara lain berupa meningkatnya impor mereka. Jadi, peningkatan pendapatan itu akan membuat negara-negara anggota persekutuan pabean dapat memperbesar impornya dari negara-negara lain yang bukan anggota. Efek TC dari penerepan FTA terhadap negara anggota dapat dianalisis dengan pendekatan ilustrasi grafik sebagai berikut:

Gambar 2.1**Efek TC dari pembentukan FTA**

Sumber: Salvatore, Dominick. 1997. *Ekonomi Internasional*, Edisi Kelima, jilid 1.

Jakarta: Erlangga, Indonesia, hal. 385

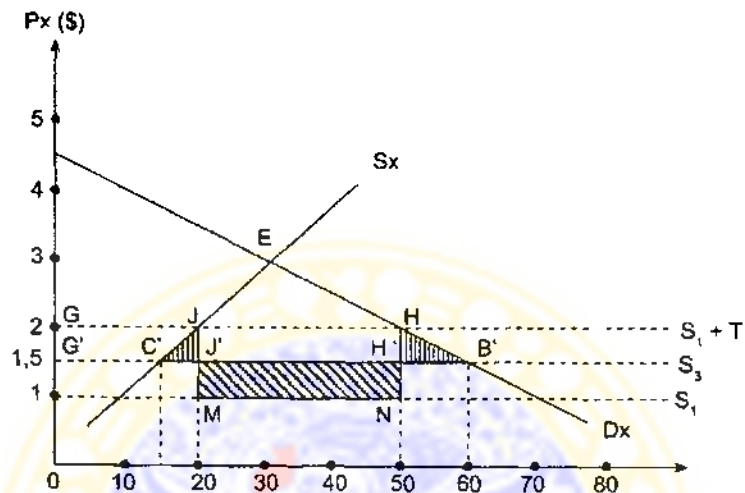
Pada gambar diatas D_x dan S_x masing-masing melambangkan kurva permintaan dan kurva penawaran komoditi X di negara 2. Sebelum dibentuknya perserikatan pabean, harga komoditi X yang sudah memperhitungkan tarif adalah $P_x = 2$ dolar. Pada tingkat harga tersebut Negara 2 akan mengkonsumsi 50X (GH), dan 20X (GJ) merupakan produksi domestik, sedangkan 30X (MHJN) merupakan impor komoditi X negara 2 dari negara 1 dengan disertai tarif karena belum diadakan persekutuan pabean. Setelah Negara 2 membentuk persekutuan pabean bersama Negara 1, maka Negara 2 itu akan meningkatkan konsumsi komoditi X menjadi 70 unit (AB). 10X (AC) di antaranya merupakan produksi domestik sedangkan 60X

(CB) merupakan impor dari Negara 1 berdasarkan harga bebas tarif $P_x = 1$ dolar. Pendapatan tarif bagi pemerintah Negara 2 lenyap, namun kesejahteraan konsumen Negara 2 akan meningkat karena akan terjadi transfer keuntungan dari produsen domestik ke konsumen domestik yang nilainya setara dengan bidang AGJC. Hal ini memberikan keuntungan statis netto bagi Negara 2 secara keseluruhan sebesar 15 dolar, atau setara dengan penjumlahan dua bidang segitiga CJM dan BHN.

- *Trade Diversion* (TD)

Diversi perdagangan (*trade diversion*) terjadi apabila impor yang murah (artinya produksinya lebih efisien) dari negara luar yang bukan merupakan anggota perserikatan pabean tergusur oleh impor yang harganya lebih mahal dari negara anggota. Hal ini terjadi karena adanya perlakuan preferensial bagi sesama negara anggota (tarifnya dihapuskan) sehingga produk dari negara luar non anggota yang sesungguhnya lebih murah menjadi lebih mahal karena ia masih harus menanggung tarif. Sementara itu produk dari negara anggota yang sesungguhnya kurang efisien, menjadi terhitung murah karena ia tidak lagi membayar tarif. Diversi perdagangan itu sendiri cenderung menurunkan kesejahteraan, karena ia menggeser kegiatan produksi dari para produsen yang lebih efisien (dari negara-negara yang bukan anggota) kepada para produsen yang kurang efisien (dari sesama anggota). Dengan demikian, adanya diversifikasi perdagangan akan memperburuk alokasi sumber daya internasional dan menjauhkan kegiatan-kegiatan produksi dari keunggulan komparatifnya.

Gambar 2.2
Efek TD dari Pembentukan FTA



Sumber: Salvatore, Dominick. 1997. *Ekonomi Internasional*, Edisi Kelima, jilid 1.
Jakarta: Erlangga, Indonesia, hal. 385

D_x dan S_x masing-masing melambangkan kurva permintaan dan kurva penawaran komoditi X di Negara 2, sedangkan S_1 dan S_3 masing-masing merupakan kurva penawaran elastis sempurna dalam kondisi perdagangan bebas untuk Negara 1 dan Negara 3. Jika Negara 2 memberlakukan tarif ad valorem secara non-diskriminatif sebesar 100 persen terhadap komoditi X, maka ia akan mengimpor 30X (JH) berdasarkan $P_x = 2$ dolar dari Negara 1. Namun setelah membentuk perserikatan pabean bersama Negara 3, maka Negara 2 akan mengimpor 45X (CB) berdasarkan $P_x = 1,5$ dolar dari Negara 3. Peningkatan kesejahteraan bagi Negara 2 yang bersumber dari kreasi perdagangan murni mencapai 3,75 dolar (atau setara dengan penjumlahan

dua segitiga yang diarsir). Namun kerugian kesejahteraan akibat adanya diversifikasi perdagangan jauh lebih besar, yakni mencapai 15 dolar. (setara dengan luas bidang segi empat yang diarsir). Jadi, adanya diversifikasi perdagangan itu mengakibatkan kerugian kesejahteraan netto bagi Negara 2 sebesar 11,25 dolar.

Kreasi perdagangan dan diversifikasi perdagangan yang bersumber dari persekutuan pabean itu sama-sama mengubah pola dan volume perdagangan yang tengah berlangsung sehingga akan dapat meningkatkan atau bisa pula sebaliknya menurunkan kesejahteraan negara-negara anggotanya. Meningkat atau menurunnya kesejahteraan itu sendiri tergantung pada mana yang lebih unggul antara dua kekuatan yang dimunculkan oleh pembentukan uni pabean itu (kreasi, atau diversifikasi perdagangan). Sementara itu, kesejahteraan negara-negara luar yang bukan anggota, sekurang-kurangnya dalam jangka pendek, kemungkinan besar akan menurun karena pendayagunaan faktor-faktor produksi dalam perekonomian mereka terpaksa dikurangi (karena pasar ekspornya menyusut) sehingga secara keseluruhan menjadi kurang efisien. Hal tersebut akan terus terjadi andaikata volume perdagangan internasional mereka tidak kunjung membaik. Seandainya perserikatan pabean tadi lebih banyak memunculkan kreasi perdagangan, maka yang akan memetik keuntungan berupa peningkatan kesejahteraan bukan hanya negara-negara anggota tapi juga negara-negara luar yang bukan anggota. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah diversifikasi perdagangan maka negara-negara anggota bisa untung bisa pula rugi, namun negara-negara luar (bukan anggota) bisa dipastikan akan merugi.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa peneliti yang membahas tentang integrasi ekonomi salah satunya adalah James Laurenceson (2003). Penelitian Laurenceson menjelaskan Integrasi ekonomi antara China dan ASEAN mengingat akan dibentuknya area perdagangan bebas antar keduanya. Menggunakan *Phillip-Perron test statistic* dengan variabel *Uncovered Interest Parity* dan *Purchasing Power Parity*. Hasil perhitungannya mengindikasikan bahwa China telah erat terintegrasi dengan ASEAN dalam perdagangan barang dan jasa. Tetapi integrasi keuangan belum dapat dicapai.

Penelitian lain yang melihat kemungkinan terjadinya integrasi riil dan keuangan antar negara dilakukan oleh Yin-Wong Cheung dkk. (2006). Dalam risetnya, mereka mengukur derajat integrasi riil dan keuangan antara China, Hong Kong, dan Taiwan dengan menggunakan data suku bunga, nilai tukar, dan CPI di tiga negara tersebut dari 1996 hingga 2002. Perhitungan didasarkan pada *international parity conditions* dengan *modified Dickey-Fuller test (ADF-GLS)* untuk analisa stasioneritasnya kondisi *parity* tersebut cenderung terjadi untuk periode yang panjang, dan besarnya deviasi dari kondisi *parity* tersebut terus mengecil dari waktu ke waktu. sehingga dapat disimpulkan bahwa China dan Hong Kong mengalami peningkatan yang signifikan dalam derajat integrasinya. Selain itu juga ditemukan bahwa perubahan nilai tukar memegang peranan penting dalam menentukan perubahan deviasi dari kondisi *parity* tersebut.

Sementara itu, Soyoung Kim dkk. (2005) ingin melihat membandingkan derajat integrasi keuangan regional dengan global di negara-negara Asia Timur. Penelitian

mereka secara kuantitatif menggunakan *gravity model* untuk menganalisa kepemilikan aset keuangan bilateral, sedangkan secara kualitatif dengan membandingkan ukuran aset antar negara seperti *securities* dan *bank claims*. Ternyata ditemukan bahwa pasar keuangan di negara-negara Asia Timur, khususnya jika dibandingkan dengan Eropa, relatif kurang terintegrasi dengan satu sama lain daripada dengan pasar keuangan global. Rendahnya derajat integrasi antar negara Asia Timur tersebut disebabkan kurangnya insentif untuk diversifikasi portofolio dalam wilayah tersebut dan adanya ketidakstabilan dalam regim nilai tukar dan moneterinya.

Sedangkan Jong Il-Choe yang menganalisis efek dari ketergantungan perdagangan bilateral terhadap kesamaan gerak siklus bisnis untuk 10 negara Asia Timur. Ditemukan bahwa fluktuasi ekonomi cenderung untuk lebih searah atau sama di suatu region ketika ketergantungan perdagangan antar mereka semakin diperkuat. Temuan ini menganjurkan adanya kerjasama untuk mencegah atau melakukan penyesuaian terhadap krisis ekonomi masa depan di Asia Timur. Penelitian tersebut berdasarkan sampel sepuluh negara-negara Asia Timur (10 EACs) yaitu, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, dan Taiwan. Jenis data yang dipergunakan adalah 45 data cross-sectional untuk 10 EACs atas dua periode, 1981–1990 dan 1986–1995.

2.3 Model Analisis dan / atau Hipotesis

2.3.1 Model Analisis

Berdasarkan pada penelitian Baele, dkk (2004), dikemukakan bahwa ada 2 pendekatan untuk mendeteksi adanya keberadaan integrasi, yang pertama adalah melalui pendekatan kuantitas (*Quantity Approach*), ini dapat dilihat dari nilai perdagangan antar 2 negara, semakin besar nilai perdagangan antar 2 negara maka semakin terintegrasi 2 negara tersebut dalam hal perdagangan. Kedua adalah melalui pendekatan harga (*Price Approach*), 2 negara dapat dikatakan terintegrasi apabila harga komoditas di 2 negara tersebut saling mempengaruhi dan bergerak bersama-sama (*Co-movement*). Semakin terintegrasi kedua negara maka semakin erat pola pergerakan harga di kedua negara tersebut.

Model analisis dengan pendekatan kuantitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang digunakan dalam penelitian Jong Il-Choe (2001) yang menganalisis hubungan antara co-movement siklus bisnis dengan kerjasama ekonomi regional.

$$RT_{ij} = \left(\frac{Trade_{ij}}{Trade_i} \right) \times 100 \quad \dots\dots\dots(6)$$

Persamaan 6 mengukur keterbukaan relatif perdagangan regional antara i terhadap j dibandingkan dengan keterbukaan relatif perdagangan negara i terhadap dunia (*rest of world*). Dimana trade ij adalah perdagangan negara i terhadap region j (ekspor plus impor). Sedangkan trade i* adalah perdagangan negara i (ekspor plus impor) terhadap dunia (*rest of world*).

Model analisis dengan pendekatan harga yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Akar Unit dengan metode *Augmented Dickey-Fuller Test* (ADF test). Estimasi untuk uji ADF dilakukan melalui persamaan regresi berikut (Hill, Griffiths, Judge, 2001):

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^m \alpha_i \Delta Y_{t-i} + U_t \quad \dots\dots\dots(7)$$

$$\Delta Y_{t-1} = (Y_{t-1} - Y_{t-2}), \quad \Delta Y_{t-2} = (Y_{t-2} - Y_{t-3})$$

Dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \gamma = 0$$

$$H_1 : \gamma < 1 \quad \dots\dots\dots(8)$$

Penentuan hipotesis H_0 : terdapat *unit-root* dilihat dengan membandingkan ADF *test-statistic* dengan *t-statistic* pada MacKinnon *critical values* 1%, 5%, dan 10%. Apabila ADF *test-statistic* lebih besar dari *t-statistic* pada MacKinnon *critical values*, maka H_0 ditolak yang artinya tidak terdapat *unit-root* pada data yang diuji (data telah stasioner). Sebaliknya, apabila ADF *test-statistic* lebih kecil dari *t-statistic* pada MacKinnon *critical values*, maka H_0 diterima yang artinya terdapat *unit-root* pada data yang diuji (data tidak stasioner). Variabel Y yang diteliti adalah deviasi dari nilai depresiasi dan diferensial inflasi antar 2 negara. Jika data deviasi depresiasi dan diferensial inflasi ini stasioner maka dapat dikatakan bahwa kedua negara tersebut terintegrasi secara perdagangan.

2.3.2 Hipotesis

Selain kerjasama ASEAN dengan negara-negara lain di dunia yang saat ini sedang dilakukan, kerjasama intra-ASEAN juga semakin diperkuat, mengingat ASEAN mulai menggagas kerjasama ekonomi antar negara-negara anggota sejak tahun 1977. Kerjasama ekonomi intra-ASEAN yang saat ini sedang ditunggu hasilnya oleh pengamat ekonomi internasional adalah AFTA yang telah disahkan sejak tahun 1992. Berdasarkan teori dan perspektif tersebut, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

1. Lima negara utama ASEAN terintegrasi secara perdagangan berdasarkan pendekatan kuantitatif (*quantity Approach*) dalam skema AFTA. Dengan berbagai kesamaan faktor produksi dan output yang dihasilkan maka memungkinkan integrasi berdasarkan pendekatan kuantitas yang dihasilkan antara negara-negara ASEAN tidak begitu kuat dibandingkan negara-negara ASEAN dengan dunia.
2. Lima negara utama ASEAN terintegrasi secara perdagangan berdasarkan pendekatan harga (*Price Approach*) dalam skema AFTA. Dengan berbagai kemiripan faktor ekonomi, moneter dan tingkat mobilitas faktor yang baik diantara negara-negara anggota ASEAN, maka integrasi perdagangan berdasarkan pendekatan harga memungkinkan untuk lebih kuat.
3. Integrasi Perdagangan berdasarkan pendekatan kuantitas maupun harga terjadi di setiap negara anggota ASEAN 5 dalam skema AFTA.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu dalam bentuk penghitungan matematis dan statistik dengan berdasar pada penelitian sebelumnya dan melalui perangkat ekonometrika. Metode ekonometrika pada penelitian ini menggunakan uji akar unit (*unit root test*) dengan metode *Augmented Dickey-Fuller test* (ADF test).

3.2. Identifikasi Variabel

Penelitian mengenai integrasi perdagangan dengan pendekatan kuantitas di ASEAN ini menggunakan variabel $Trade_{ij}$ adalah perdagangan negara i terhadap region j (ekspor plus impor) dan variabel $Trade_{i*}$ adalah perdagangan negara i (ekspor plus impor) terhadap dunia (*rest of world*). Variabel tersebut akan dihitung berdasarkan persamaan pada penelitian Jong Il-Choe (2001).

Sedangkan mengenai integrasi perdagangan dengan pendekatan harga menggunakan variabel-variabel berikut: Δ sebagai operator *first difference* yaitu perubahan 1 periode (bulanan) pada suatu variabel; Y_t sebagai variabel yang akan dilihat, dalam hal ini adalah Variabel Y yang diteliti adalah deviasi dari nilai depresiasi dan diferensial inflasi antar 2 negara untuk melihat ada atau tidaknya integrasi

perdagangan; γ sebagai koefisien depresiasi dan diferensial inflasi antar 2 negara; m sebagai panjang *lag* optimal di negara i ; α_i sebagai koefisien *lag*; dan ε_t sebagai *error term* yang diasumsikan sebagai *stationary shock*. Variabel-variabel tersebut akan diestimasi dengan *unit-root test* untuk mengetahui ada tidaknya integrasi perdagangan di ASEAN.

3.3. Definisi Operasional

Pada persamaan matematis dalam pendekatan kuantitas adalah:

RT : Tingkat keterbukaan relatif perdagangan regional antara i terhadap j .

$Trade_{ij}$: Perdagangan negara i terhadap region j (ekspor plus impor).

$Trade_{i\bullet}$: Perdagangan negara i (ekspor plus impor) terhadap dunia (*rest of world*).

Pada model ekonometri (*ADF test*) dalam pendekatan harga adalah:

Y_t : Deviasi dari nilai depresiasi dan diferensial inflasi antar 2 negara dihitung dengan mengurangkan persentase perubahan kurs antar periode t dan $t-1$ (depresiasi) dengan selisih inflasi antar 2 negara, dimana inflasi dihitung dari persentase pertumbuhan CPI (*Consumer Price Index*) antar periode t dan $t-1$.

Uji stasioneritas pada data ini digunakan untuk menguji keberadaan integrasi dalam hal perdagangan.

γ : Nilai koefisien variabel (γ) yang mengindikasikan ada atau tidaknya integrasi

m : Panjang *lag* di tiap negara. Agar diperoleh *lag* optimal, panjang *lag* dihitung dengan pendekatan *Akaike Info Criterion* (AIC).

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data adalah data sekunder yang diambil dari International Financial Statistic (IFS) sebagai sumber data finansial milik *International Monetary Fund* (IMF) secara online. Nilai ekspor maupun impor tiap negara didapat langsung melalui IFS. Nilai kurs bilateral antar 2 negara didapat melalui rasio nilai kurs kedua negara dalam US\$. Inflasi tiap negara didapat dengan menghitung persentase pertumbuhan Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index – CPI*) antar periode t dan $t-1$.

Data ekspor, impor, nilai kurs/US\$ dan CPI agregat tersebut berupa data dari observasi bulanan terhadap 5 negara anggota awal ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Indonesia) pada periode mulai diterapkannya AFTA di ASEAN pada 1993-2006. Negara ASEAN yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini hanya lima negara karena kelima negara tersebut adalah negara-negara anggota ASEAN yang mengawali pendirian ASEAN dan memiliki perekonomian yang terbesar daripada lima negara ASEAN yang lain, sehingga sudah dapat dikatakan mewakili ASEAN sesuai dengan tujuan penelitian.

3.5. Prosedur Pengumpulan Data

Sampel data ekspor, impor, CPI dan nilai kurs yang digunakan dikumpulkan melalui survei berbagai macam literatur dari internet dan IFS merupakan sumber data yang paling sesuai dengan kebutuhan penulisan ini karena data dari IFS tersedia dalam bentuk bulanan, kuartalan dan tahunan dalam jangka waktu yang sangat panjang serta mencakup banyak negara.

3.6. Teknik Analisis

3.6.1. Integrasi Perdagangan dengan Pendekatan Kuantitas

Persamaan didapat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jong Il-Choe (2001) yang meneliti mengenai efek dari ketergantungan perdagangan bilateral terhadap kesamaan gerak siklus bisnis untuk 10 negara Asia Timur dengan menggunakan:

$$RT_{ij} = \left(\frac{Trade_{ij}}{Trade_{i*}} \right) \times 100 \quad \dots\dots\dots(9)$$

Persamaan diatas mengukur keterbukaan relatif perdagangan regional antara i terhadap j dibandingkan dengan keterbukaan relatif perdagangan negara i terhadap dunia (*rest of world*). Dimana $trade_{ij}$ adalah perdagangan negara i terhadap region j (ekspor plus impor). Sedangkan $trade_{i*}$ adalah perdagangan negara i (ekspor plus impor) terhadap dunia (*rest of world*). Suatu negara dikatakan terintegrasi perdagangan dengan suatu region berdasarkan pendekatan kuantitas menurut Jong Il-Choe (2001) adalah jika RT_{ij} menunjukkan nilai yang positif, semakin besar nilai RT_{ij} maka semakin besar derajat integrasi perdagangan antara negara i dengan region j .

3.6.2. Integrasi Perdagangan dengan Pendekatan Harga

3.6.2.1. Augmented Dickey-Fuller Test

Menurut Gujarati (2003), data *time series* dikatakan stasioner bila *mean*, *variance* konstan dan *covariance* tergantung dari gap antara 2 periode waktu dan tidak tergantung pada waktu aktual ketika *covariance* dihitung. Sebaliknya, data *time*

series dikatakan tidak bersifat stasioner jika *mean*, *variance* dan *covariance* data tersebut tidak konstan. Salah satu teknik uji akar unit adalah metode *Augmented Dickey-Fuller Test (ADF test)* yang dikembangkan oleh Dickey dan Fuller. Estimasi untuk uji ADF dilakukan melalui persamaan regresi berikut (Hill, Griffiths, 2001):

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^m \alpha_i \Delta Y_{t-i} + U_t \quad \dots\dots\dots(10)$$

$$\Delta Y_{t-1} = (Y_{t-1} - Y_{t-2}), \quad \Delta Y_{t-2} = (Y_{t-2} - Y_{t-3})$$

Dengan hipotesis sebagai berikut:

$$H_0 : \gamma = 0$$

$$H_1 : \gamma < 1 \quad \dots\dots\dots(11)$$

Penentuan hipotesis H_0 : terdapat *unit-root* dilihat dengan membandingkan *ADF test-statistic* dengan *t-statistic* pada *MacKinnon critical values* 1%, 5%, dan 10%. Apabila *ADF test-statistic* lebih besar dari *t-statistic* pada *MacKinnon critical values*, maka H_0 ditolak yang artinya tidak terdapat *unit-root* pada data yang diuji (data telah stasioner). Demikian pula sebaliknya, apabila *ADF test-statistic* lebih kecil dari *t-statistic* pada *MacKinnon critical values*, maka H_0 diterima yang artinya terdapat *unit-root* pada data yang diuji (data tidak stasioner).

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Subyek dan Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Subyek: Sejarah dan Perkembangan ASEAN

Sebelum ASEAN terbentuk pada tahun 1976, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional di kawasan ini seperti ASA (*Association of Southeast Asia*), MAPHILINDO (Malaysia, Philipina, Indonesia), dan SEAMEO (*Soth East Asian Minister of Education Organization*) maupun dengan negara-negara lain di luar kawasan, seperti SEATO (*South East asia Treaty Organization*) dan ASPAC (*Asia and Pacific Council*)¹.

Pembentukan ASA ada tahun 1961 bertujuan untuk memajukan kerjasama ekonomi kebudayaan diantara negara-negara anggotanya yaitu Malaysia, Filipina dan Thailand. Kemudian pada tahun 1963 dibentuk MAPHILINDO yang merupakan forum kerjasama antara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Dasar pembentukannya berpegang pada Piagam PBB, Deklarasi Bandung serta persamaan ras. Namun kedua bentuk kerjasama ini tidak berlangsung lama. Kegagalan kedua kerjasama ini dipengaruhi oleh adanya pertentangan dan rasa saling curiga diantara negara-negara anggotanya.

Pada tahun 1961 dibentuk ASPAC yang beranggotakan Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam Selatan, Malaysia, Thailand, Filipina, Australia dan

¹ www.aseansec.org

Selandia baru. Meskipun menitikberatkan pada kerjasama ekonomi, namun dari komposisi anggotanya terlihat ada kecenderungan politik pada salah satu blok.

SEAMEO didirikan pada tahun 1965 oleh Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam dengan tujuan meningkatkan kerjasama antara bangsa-bangsa Asia Tenggara melalui pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan. Bermarkas besar di Bangkok dan keanggotaannya kemudian meliputi negara-negara ASEAN dan non-ASEAN.

Tumbuhnya kesadaran akan perlunya kerjasama untuk meningkatkan taraf hidup di antara bangsa-bangsa dalam satu regional, mendorong mereka mengupayakan pengembangan kerjasama yang lebih kuat. Perkembangan geopolitik Asia Tenggara sesudah 1965 sangat mempengaruhi usaha-usaha untuk mencari pemecahan bersama atas berbagai masalah yang dihadapi setiap negara.

Dampak positif dari meredanya konflik di antara bangsa-bangsa di Asia Tenggara mendorong pembentukan organisasi kerjasama regional. Pertemuan-pertemuan konsultatif yang dilakukan secara intensif antara para Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand yang menghasilkan rancangan *Joint Declaration*, yang mencakup kesadaran akan perlunya peningkatan saling pengertian untuk hidup bertetangga serta kerjasama yang bermanfaat di negara-negara yang sudah terikat oleh pertalian sejarah dan kebudayaan. Dalam pertemuan 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh wakil Perdana Menteri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Philipina, Singapura dan Thailand yang

menandai berdirinya *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) yang berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

4.1.1.1. Maksud dan tujuan Dibentuknya ASEAN

Maksud dan tujuan dibentuknya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok yaitu¹ :

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Agar dapat saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;

¹ Soesastro, Hadi. 2003. *An ASEAN Community and ASEAN+3: How do They fit Together*. Pacific Economic Paper No 338. Australia-Japan Research Centre. Asia Pacific school of Economics and Government

5. Agar dapat bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka;
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;
7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat diantara mereka.

Pada mulanya ASEAN merupakan wadah kerjasama, sosial dan budaya. Akan tetapi aspirasi politik yang mendasari Deklarasi Bangkok mengupayakan stabilitas regional yang dapat menunjang pembangunan nasional di segala bidang bagi negara-negara anggota ASEAN (Tambunan, 2004). Deklarasi Bangkok merupakan komitmen politik negara-negara anggota untuk bersatu dan bekerjasama, meskipun Asia Tenggara pada saat itu dipenuhi oleh pergolakan antar negara maupun antar kekuatan diluar kawasan. Para pemimpin/pendiri ASEAN menyadari bahwa di antara negara-negara anggota terdapat perbedaan latar belakang sejarah maupun sikap politik serta kenyataan bahwa dalam bidang ekonomi sebagian besar negara anggota bersaing sebagai penghasil komoditi yang sama. Oleh karenanya langkah yang diambil bersifat pragmatis.

4.1.1.2. Keanggotaan ASEAN

Sesuai dengan Deklarasi Bangkok pasal 4, keanggotaan ASEAN terbuka bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya dengan syarat bahwa negara calon anggota dapat menyetujui dasar-dasar dan tujuan organisasi ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN dan semua traktat/persetujuan yang telah dibuat ASEAN. Disamping itu perlu adanya kesepakatan semua negara anggota ASEAN mengenai keanggotaan baru.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ASEAN yang ke-6 pada Januari 1984, dalam Sidang Khusus Menteri-menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta. Vietnam diterima menjadi anggota ASEAN yang ke-7 dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri (AMM) ke-28 pada 29-30 Juli 1995 di Bandar Sri Begawan. Pertemuan tersebut juga memberikan status peninjau kepada Kamboja dan menerima akses Myanmar terhadap Traktat Bali 1976. Pada kesempatan tersebut Kamboja dan Laos juga telah menyatakan keinginannya untuk menjadi anggota ASEAN pada tahun 1997. Demikian juga Myanmar telah mengajukan permintaan untuk diterima menjadi anggota ASEAN. Pada AMM ke-29 di Jakarta 20-21 Juli 1996, telah disepakati untuk meningkatkan status Myanmar dari Negara Konsultatif menjadi Negara Peninjau dalam negara ASEAN. Untuk mengetahui kesiapan Kamboja dan Laos menjadi anggota ASEAN, suatu tim pencari fakta ASEAN yang dipimpin Dirjen Setnas ASEAN Indonesia mengadakan kunjungan ke kedua negara tersebut pada 7-15 Februari 1996. Pada KTT Informal pertama para Kepala Pemerintahan ASEAN di Jakarta, tanggal 30 November 1996,

disepakati bahwa Kamboja, Laos, Myanmar akan diterima menjadi anggota ASEAN pada waktu bersamaan. Sesuai keputusan tersebut, dalam rangkaian pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke 30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal 23-28 Juli 1997 Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota penuh ASEAN melalui suatu upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997. Sementara itu keanggotaan Kamboja ditangguhkan sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian, dikarenakan adanya kekacauan politik dalam negeri Kamboja pada minggu pertama Juli 1997. Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN pada KTT ASEAN ke-VI di Hanoi tanggal 15-16 Desember 1998 sepakat untuk menerima Kamboja sebagai anggota penuh ASEAN dan menginstruksikan para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk mengadakan upacara resmi penerimaannya di Hanoi dalam waktu dekat. Dengan diterimanya Kamboja, maka cita-cita para pendiri ASEAN untuk mewujudkan ASEAN yang mencakup negara Asia tenggara telah tercapai.

4.1.2 Gambaran Umum Obyek : Perdagangan Intra-ASEAN

Dalam bidang ekonomi, karena praktis hampir semua negara-negara ASEAN menghasilkan produk-produk yang sama, maka terjadi persaingan yang ketat antar sesama mereka sehingga keberadaan ASEAN tidak terlalu berarti bagi peningkatan volume perdagangan di dalam ASEAN. Lebih lanjut, dalam menghadapi perubahan perekonomian dunia yang semakin cepat dan global ASEAN perlu memperbaiki visinya dalam hal kekuatan ekonomi baik secara internal (dalam satu kekuatan ekonomi regional yang saling mendukung) maupun secara eksternal (membentuk

suatu kekuatan ekonomi dalam menghadapi ekonomi global) (Frolova, 2004). Oleh karena itu secara internal, dibentuklah kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA, yang disepakati dalam konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-4 di Singapura pada awal tahun 1992 (dikenal dengan Deklarasi Singapura 1992).

Melalui deklarasi tersebut ada 2 buah dokumen penting dalam bidang ekonomi. Pertama, kerangka persetujuan peningkatan kerja sama ekonomi ASEAN. Kedua, persetujuan dasar tentang tarif preferensi efektif bersama (CEPT) yang merupakan kesepakatan ASEAN untuk mewujudkan AFTA melalui proses penurunan tarif secara bertahap sesuai skema CEPT sebagai mekanisme utamanya (Tabel 4.1). Menurut kesepakatan awal, AFTA akan dicapai dalam jangka waktu 15 tahun sejak 1 Januari 1993, jadi berlaku penuh pada 2008 dengan sasaran penurunan tarif impor hingga mencapai antara 0% hingga 5%, tetapi akhirnya disepakati untuk dipercepat menjadi 2003 (Lothian, 2005). Pada tabel 4.1 berikut menunjukkan rata-rata tarif antara negara-negara anggota AFTA. Dapat dilihat bahwa negara-negara anggota AFTA dapat mengenakan tarif kurang dari 5% pada tahun 2003. Bahkan, Thailand yang sebelumnya merupakan negara anggota AFTA dengan pemberlakuan tarif tertinggi, pada tahun 2003 dapat menetapkan tarif 4,64% dari total impor yang berasal dari negara-negara anggota AFTA.

Tabel 4.1

Rata-rata Tarif AFTA Menurut Negara Anggota (%)

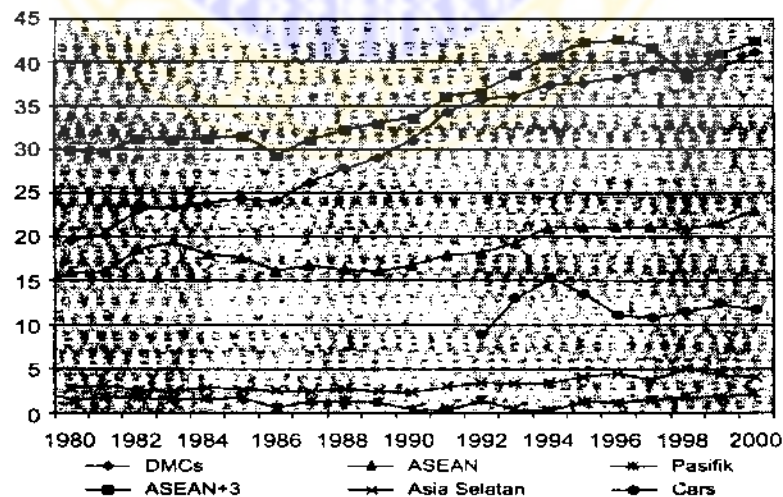
Negara Anggota	1999	2001	2003
Indonesia	5,85	4,63	3,71
Malaysia	3,17	2,54	2,06
Filipina	7	5,07	3,75
Singapura	0	0	0
Thailand	9,75	7,36	4,64

Sumber: Tambunan, 2004.

Setelah tahun 1990 an, keberhasilan ASEAN dalam memajukan kesejahteraan sosial di antara negara-negara anggotanya terlihat dari keberhasilan melakukan integrasi dan harmonisasi ekonomi regional. Hal ini dapat terlihat pada Gambar 4.1 dimana rasio perdagangan intra-ASEAN meningkat dari 16,0% pada tahun 1980 ke 16,9% pada tahun 1990 dan pada tahun 1995 sebesar 21,1%.

Grafik 4.1

Pertumbuhan Rasio Perdagangan Intraregional dari beberapa Subregional di Asia: tahun 1980-2000



Sumber: Tulus Tambunan (2004), *'Globalisasi dan perdagangan Internasional'*, hal.261

Tantangan bagi negara-negara di Asia, termasuk ASEAN dalam hal perdagangan, datang dari negara-negara Eropa Timur yang merubah sistem ekonominya menjadi sistem ekonomi pasar. Sehingga mereka dapat mengembangkan perekonomiannya dengan lebih maju sesuai tuntutan global (Baele, 2004). Akhirnya Eropa Timur hanya memberi kesempatan bagi masuknya produk-produk Asia, tapi juga mereka secara aktif melakukan persaingan. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan hubungan perekonomian yang lebih erat antar negara-negara ASEAN. Semakin besar hubungan ekonomi ASEAN, akan meningkatkan kualitas persaingan produksi negara-negara ASEAN di pasar internasional dan membuat pasar ASEAN menjadi lebih menarik (Hew, 2000). ASEAN juga merupakan wilayah yang menarik bagi investasi asing, karena potensi pasar ASEAN yang besar dan terus berkembang. Ada banyak keuntungan dan kesempatan yang dihasilkan dari semakin eratnya integrasi ekonomi ASEAN, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kemakmuran di wilayah tersebut (Bustelo, 1998).

Dengan program reformasi ekonomi domestik di semua negara ASEAN dan perluasan kesempatan sektor swasta, ASEAN akan mendapatkan kerjasama ekonomi yang lebih mudah dibanding sebelumnya (Cheung, 2003). Meningkatnya peranan sektor industri yang dicapai seluruh negara ASEAN menyebabkan berkurangnya hambatan untuk perdagangan dan investasi. Tidak diragukan lagi bahwa ASEAN adalah salah satu wilayah yang menarik di dunia dan mempunyai prospek yang baik dalam kerjasama ekonomi. ASEAN sebagai suatu organisasi regional mengalami

peningkatan secara impresif dan berhasil dalam membina kerjasama ekonomi. Adanya kerjasama ekonomi tersebut menciptakan kawasan ASEAN menjadi makmur dan stabil, sehingga mendukung kelanjutan pembangunan di masing-masing negara anggotanya (Hiro Lee, 2005).

4.1.2.1. Kerjasama Ekonomi Intra ASEAN

4.1.2.1.1 Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangement

Pada era awal 1980 negara-negara ASEAN merupakan kawasan yang dijuluki sebagai “Pusat Pertumbuhan baru”, berdasarkan kemajuan-kemajuan yang diperoleh negara anggotanya secara cepat. Ekonomi-ekonomi ASEAN memang sudah mengalami perubahan-perubahan besar sejak tahun 1976, yaitu sejak penandatanganan Deklarasi Kesepakatan ASEAN sebagai dokumen yang penting mengenai kerjasama ekonomi di bidang komoditi pangan dan energi, industri dan perdagangan. Pada tahun 1977 di Manila di tandatangani “*Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangement*” (ASEAN PTA) yang merupakan skema-skema perdagangan preferensi antar negara anggota ASEAN yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1978 (Tambunan, 2004).

Mekanisme ASEAN PTA memiliki 5 perangkat², sebagai berikut:

- a. Pertukaran Preferensi tarif (*Exchange of Tariff Preference*)
- b. Kontrak kuantitatif jangka Panjang (*Long Term Quantity Contracts*)

² Tambunan, Tulus. 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- c. Pembelian Preferential oleh Pemerintah (*Preferential Procurement by Government Entities*)
- d. Liberalisasi Non-Tarif Atas dasar Preferensi (*Liberalisasi of Non-tariff Measure on preferential Basis*); dan
- e. Persyaratan Preferensial bagi pembiayaan Impor (*preferential Terms for the Financing of Imports*)

ASEAN PTA dalam kenyataannya dianggap tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan, karena ASEAN PTA belum mencakup inti perdagangan yang secara nyata diperdagangkan dan belum dapat memberikan tingkat preferensi yang memadai. Selain itu ASEAN PTA didasarkan atas pendekatan selektif melalui prosedur administrasi yang panjang dan rumit serta belum mencakup hambatan-hambatan non-tarif. Faktor lain yang mempengaruhi antara lain yaitu rendahnya tingkat komplementaris dan dianutnya kebijaksanaan substitusi impor yang bersifat *inward looking* sehingga kurang mendukung upaya pengembangan perdagangan intra-ASEAN pada saat itu.

4.1.2.1.2 Persetujuan ASEAN Free Trade Area dan Skema CEPT

KTT ASEAN ke-3 di Manila pada tahun 1987 sepakat untuk melakukan suatu usaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi di ASEAN dengan mengambil inisiatif-inisiatif dan arahan-arahan baru. Keputusan itu diambil karena terjadinya serangkaian perubahan yang mendasar dalam tata hubungan ekonomi dunia sebagaimana ditandai oleh adanya globalisasi ekonomi, diantaranya

adalah semakin meluasnya sistem ekonomi pasar di negara-negara Eropa timur disertai munculnya berbagai kelompok-kelompok ekonomi regional yang dikhawatirkan mengarah kepada pembentukan blok ekonomi tertutup dan lambannya perundingan *Uruguay Round* pada saat itu:

Rangkaian terobosan inisiatif yang dimaksud antara lain (Hew, 2000):

1. Usul inisiatif Filipina tentang kerangka kerjasama ASEAN yang berupa “*ASEAN Treaty of Economic Cooperation*” (ATEC) diajukan dalam pertemuan para Menteri Luar negeri ASEAN (AMM) ke-23 di Jakarta pada tahun 1990 namun tidak ada kelanjutannya.
2. Gagasan Indonesia mengenai “*Common Effective Preferential Tariff*” (CEPT) yang disetujui pada pertemuan para Menteri Ekonomi (AEM) ke-23 di Bali, Oktober 1990.
3. Pada pertemuan AEM ke-22 tersebut Singapura juga mengajukan gagasan mengenai kawasan Segi Tiga Pertumbuhan (*Growth Triangle*) yang pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang mengembirakan.
4. Menjelang AMM ke-24 di Kuala Lumpur, 24 Juli 1991, Thailand mengajukan gagasan mengenai pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Area*) pada akhir abad ke-20.

Selanjutnya negara-negara anggota ASEAN menyepakati 2 dokumen untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan ASEAN pada KTT ASEAN IV di Singapura, 27-28 Januari 1992, yaitu:

1. *“The Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation”*, yang menjadi landasan bagi kerjasama ASEAN di berbagai bidang ekonomi.
2. *“The Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)”*, yang merupakan perjanjian kerjasama untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) dalam waktu 15 tahun terhitung mulai 1 Januari 1993, dengan menggunakan CEPT sebagai konsep utamanya.

4.1.2.1.3 Jadwal pelaksanaan AFTA dan perkembangannya

Skema CEPT mempunyai tujuan untuk meningkatkan daya kompetisi ASEAN dalam pasar internasional melalui penurunan tarif menjadi 0-5% pada tanggal 1 Januari 2008 atau dalam waktu 15 tahun sejak 1 Januari 1993. Akan tetapi masing-masing negara tetap mempertahankan regim bea masuk dan kebijaksanaan perdagangan mereka terhadap negara-negara di luar kawasan.

Pada dasarnya CEPT–AFTA ini meliputi tiga elemen utama, yaitu :

1. Program pengurangan tingkat tarif yang secara efektif sama diantara negara-negara ASEAN.
2. Penghapusan hambatan-hambatan kuantitatif (*quantitatif restrictions*) dan hambatan-hambatan non tarif (*non-tariff barriers*)
3. Mendorong kerjasama untuk mengembangkan fasilitas perdagangan terutama di bidang bea masuk serta standar dan kualitas.

Skema CEPT ini meliputi semua produk manufaktur termasuk produk-produk kapital dan produk-produk pertanian olahan. Pada awalnya skema CEPT-AFTA belum memasukkan produk-produk pertanian non-olahan, yang diatur secara khusus.

Dalam penerapannya, skema CEPT memperkenankan pengurangan tarif melalui dua program yaitu: Program Jalur Cepat (*Fast Track*) dan Program Jalur Normal (*Normal Track*).

Dibawah Program Jalur Cepat terdapat dua jadwal pengurangan tarif:

- a. Produk yang mempunyai tarif diatas 20%, akan dikurangi menjadi 0-5% pada tahun 2003 (10 tahun)
- b. Produk yang mempunyai tarif pada atau di bawah 20%, akan dikurangi tarifnya menjadi 0-5% pada tahun 2000 (7 tahun).

Produk yang termasuk dalam program Jalur Cepat meliputi 15 kelompok produk, yaitu; minyak nabati, kimia, pupuk, produk hasil karet, bubur kertas dan kertas, perabot kayu dan rotan, perhiasan/permata, semen, obat-obatan, plastik, barang-barang kulit, tekstil, keramik dan gelas, elektronika, dan tembaga katoda (*copper cathode*).

Dibawah program Jalur Normal terdapat dua jadwal pengurangan tarif:

- a. Produk yang mempunyai tarif di atas 20% pertama akan dikurangi dalam dua tahap:
 - Pertama, menjadi 20% dalam waktu 5-8 tahun (pada 2001)

- Kedua, menjadi 0-5% dalam waktu 7 tahun sesuai jadwal yang disepakati pada 1 Januari 2008.

- b. Produk yang mempunyai tarif pada atau di bawah 20% akan diturunkan menjadi 0-5% pada tahun 2003 (10 tahun).

Agar suatu negara dapat menikmati preferensi yang diberikan oleh Skema CEPT, maka mereka harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Produknya harus tercatat, baik di negara importir maupun di negara eksportir
- b. Produk tersebut harus mempunyai jadwal penurunan tarif. Untuk produk bertarif 0-5% secara otomatis dapat menikmati preferensi dari Skema CEPT ini
- c. Produk-produk dalam Skema CEPT ini harus memenuhi ketentuan memiliki 40% kandungan lokal, secara individual atau kumulatif.

Menyadari adanya perbedaan dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan perdagangan dari negara-negara anggota ASEAN, Skema CEPT masih memberikan peluang untuk memperkenankan adanya pengecualian-pengecualian terhadap produk-produk tertentu untuk tidak dimasukkan ke dalam Skema CEPT atas dasar pertimbangan –pertimbangan sebagai berikut:

- a. Daftar pengecualian sementara (*Temporary Exclusion List /TEL*); negara-negara anggota masih diperkenankan untuk tidak memasukkan produk-produk tertentu yang dianggap sensitif (perlu perlindungan) hingga tahun 2001 atau

selama 8 tahun yang kemudian ditinjau kembali untuk dimasukkan ke dalam Skema CEPT-AFTA

- b. Pengecualian umum (*General Exemption/GE*) ; produk-produk sensitif yang dikecualikan melalui kategori ini adalah produk-produk persenjataan, produk-produk yang mengandung nilai seni, sejarah, dan arkeologis serta produk-produk pornografi yang dianggap dapat menimbulkan degradasi moral masyarakat; dan
- c. Produk pertanian non-olahan (*Unprocessed Agriculture Product/UAP*); produk yang termasuk dalam kategori ini meliputi bahan pertanian mentah atau produk-produk yang mengalami proses sederhana.

Pada perkembangan selanjutnya, yaitu pada KTT ASEAN VI (Hanoi, 15-16 Desember 1998), disepakati bahwa perlu adanya upaya untuk mengembalikan kepercayaan dunia usaha sehingga pemulihan ekonomi akibat krisis yang terjadi sejak pertengahan 1997 di kawasan ASEAN dapat dipercepat. Untuk itu, diupayakan langkah-langkah terobosan yang dinamakan *Bold Measures*³ yang terdiri dari tiga kebijakan yang menjadi perhatian utama dari dunia usaha, baik di ASEAN maupun di dunia, yaitu dibidang perdagangan, investasi dan jasa.

Khusus untuk perdagangan barang, ASEAN sepakat untuk mempercepat pencapaian kawasan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free trade Area /AFTA*) dari tahun 2003 menjadi tahun 2002. Dalam hal ini, enam anggota awal ASEAN

³ Sixth ASEAN Summit, Meeting of the ASEAN Head of state/Government, hanoi, 15-16 Desember 1998. ASEAN Secretariat, Jakarta, 1999. www.aseansec.org

yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Brunai Darussalam sepakat untuk menetapkan target maksimum bea masuk 0-5% untuk : 85% dari *Inclusion List* di tahun 2000, 90% dari *Inclusion List* di tahun 2001, dan 100% dari *Inclusion List* di tahun 2002. Selain itu, juga disepakati bahwa masing-masing negara akan berupaya untuk mencapai bea masuk 0% bagi sebanyak mungkin pos tarif.

Dalam rangka pelaksanaan AFTA tersebut, produk-produk yang ada di negara-negara ASEAN akan memperoleh keringanan bea masuk dimana pada tahun 2003 besarnya 0-5%. Adapun produk-produk dalam rangka AFTA tersebut, dikelompokkan sebagai berikut:

- a. *Inclusion List (IL)* : produk-produk yang diturunkan bea masuknya sampai mencapai tingkat 0-5% pada tahun 2003
- b. *Temporary Inclusion List (TEI)* : produk-produk yang penurunan bea masuknya ditunda, namun paling lambat tahun 2000 sudah mulai diturunkan sampai 0-5% di tahun 2003
- c. *Sensitive List (SL)*: produk-produk pertanian yang dianggap sangat sensitif sehingga penurunan bea masuknya diperpanjang sampai tahun 2010 (bukan tahun 2003), beberapa diantaranya baru diturunkan tahun 2020
- d. *General Exception List (GEL)*: produk-produk yang disepakati untuk tidak perlu diturunkan bea masuknya.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 5 negara utama ASEAN saling terintegrasi secara perdagangan berdasarkan pendekatan kuantitas (*Quantity Approach*) maupun pendekatan harga (*Price Approach*), sehubungan dengan terikatnya negara-negara tersebut dalam perjanjian *AFTA (ASEAN Free Trade Area)*. Metode analisis yang digunakan dalam pendekatan kuantitas ialah persamaan berdasarkan penelitian oleh Jong Il-Choe (2001) mengenai efek dari ketergantungan perdagangan bilateral terhadap kesamaan gerak siklus bisnis untuk 10 negara Asia Timur yang mengukur keterbukaan relatif perdagangan regional antara i terhadap j dibandingkan dengan keterbukaan relatif perdagangan negara i terhadap dunia (*rest of world*). Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam pendekatan harga ialah uji akar unit (*unit root test*) dengan variabel deviasi dari nilai depresiasi kurs dan diferensial inflasi antar 2 negara. Periode yang dianalisis adalah periode mulai diterapkannya AFTA di ASEAN pada 1993m1-2006m6. Seluruh proses pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan software *Microsoft Excel 2003 Profesional Edition* dan *EViews Basic 4.1*.

Data *Trade* dalam persamaan Jong Il-Choe (2001) merupakan penjumlahan dari data impor dan ekspor yang dilakukan suatu negara dengan ASEAN. Setelah itu, nilai tersebut dibandingkan dengan data *trade* negara tersebut dengan dunia jika hasilnya positif maka negara tersebut lebih terintegrasi secara kuantitas dengan negara-negara ASEAN dibandingkan dengan negara-negara di luar ASEAN. Berbeda

dengan pendekatan harga, sebelum uji akar unit dilakukan terlebih dahulu dilakukan penghitungan persentase perubahan nilai kurs antar 2 negara untuk mengetahui nilai depresiasi bilateral, kemudian inflasi didapat melalui persentase perubahan tingkat harga (CPI). Selanjutnya deviasi dari nilai depresiasi dan diferensial inflasi diperoleh dengan mengurangkan depresiasi dengan selisih inflasi antar 2 negara. Hal ini dilakukan karena mengacu dalam teori PPP relatif yang mengatakan bahwa perbedaan antara nilai depresiasi dan diferensial inflasi untuk dua negara yang terintegrasi perdagangan penuh (tidak ada hambatan) adalah 0. Dalam kenyataannya, hambatan antar negara selalu ada, maka jika diferensial tidak 0 masih dapat dikatakan terintegrasi selama diferensial tersebut memiliki rataan dan *varians* yang konstan (*stationer*). Kekuatan integrasi perdagangan dapat dilihat berdasarkan deviasi nilai absolut rataan dari deviasi nilai PPP (*Purchasing Power Parity*), semakin kecil atau semakin mendekati 0 nilai absolut rataan maka semakin terintegrasi negara-negara tersebut.

Hasil uji berdasarkan persamaan Jong Il-Choe (2001) menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN lebih terintegrasi dengan negara-negara diluar ASEAN, hal ini bisa dikarenakan barang-barang yang dihasilkan oleh negara-negara ASEAN mirip satu sama lain. Jadi meskipun tarif antar negara-negara anggota ASEAN diturunkan hal ini tidak akan berdampak besar pada peningkatan integrasi perdagangan ASEAN. Uji akar unit (*unit root test*) menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN relatif terintegrasi di bidang perdagangan pada periode dalam skema AFTA, hal ini bisa dikarenakan adanya kemiripan faktor kondisi makro ekonomi

khususnya moneter, sebagaimana diketahui bahwa uji berdasarkan pendekatan harga lebih menekankan pada hubungan bahwa harga komoditas di 2 negara tersebut saling mempengaruhi dan bergerak bersama-sama (*Co-movement*). Semakin erat pola pergerakan harga di kedua negara maka semakin terintegrasi kedua negara tersebut.

4.3. Analisis Model dan Pengujian Hipotesis

4.3.1 Integrasi Perdagangan dengan Pendekatan Kuantitas

Berdasarkan persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Jong Il-Choe (2001), Integrasi Perdagangan dengan Pendekatan Kuantitas dapat diukur melalui persamaan berikut:

$$RT_{ij} = \left(\frac{Trade_{ij}}{Trade_i} \right) \times 100 \quad \dots\dots\dots(12)$$

Dimana trade ij adalah perdagangan negara i terhadap region j (ekspor plus impor). Sedangkan trade i^* adalah perdagangan negara i (ekspor plus impor) terhadap dunia. Suatu negara dikatakan terintegrasi perdagangan dengan suatu region berdasarkan pendekatan kuantitas menurut Jong Il-Choe (2001) adalah jika RT_{ij} (keterbukaan relatif perdagangan regional) menunjukkan nilai yang positif, semakin besar nilai RT_{ij} maka semakin besar derajat integrasi perdagangan antara negara i dengan region j . Periode penelitian adalah dalam skema AFTA (1993-2006) dengan sampel data tahunan (*annual*).

Tabel 4.2 berikut ini menunjukkan hasil penghitungan tingkat keterbukaan perdagangan 5 negara utama ASEAN (Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan

philipina) terhadap ASEAN (R_{ij}) berdasarkan persamaan 12. Yaitu persamaan integrasi perdagangan dengan pendekatan kuantitas menurut Jong Il-Choe (2001).

Secara keseluruhan tingkat keterbukaan 5 negara utama ASEAN terhadap ASEAN menunjukkan peningkatan. Dapat dilihat pada negara Indonesia, persentase keterbukaan dari dimulainya skema AFTA pada 1993 sebesar 11,75 terus menunjukkan peningkatan hingga hampir dua kali lipatnya yaitu 23,26 pada akhir 2006, peningkatan tersebut juga diwarnai beberapa kali penurunan pada periode 1997 dan 1999 – 2001.

Tabel 4.2

**Persentase Keterbukaan Perdagangan ASEAN 5 Terhadap ASEAN
Periode Dalam Skema AFTA (1993 – 2006)**

	Indonesia	Malaysia	Singapura	Philipina	Thailand
1993	11.75	24.34	20.46	9.06	14.73
1994	12.53	23.41	20.11	10.88	16.53
1995	12.43	22.42	19.59	11.88	17.05
1996	13.80	24.13	19.89	12.72	16.95
1997	13.50	24.28	20.16	13.01	17.15
1998	16.18	23.62	19.57	13.71	16.81
1999	15.28	23.65	20.17	13.65	17.32
2000	15.92	25.39	21.55	15.39	18.07
2001	15.78	24.00	20.80	15.90	17.81
2002	17.13	24.47	21.49	15.91	18.42
2003	17.35	24.52	19.87	16.95	18.68
2004	19.23	24.99	18.93	18.38	19.45
2005	21.10	25.83	18.34	18.20	20.08
2006	23.26	27.33	18.05	20.02	20.39

Negara berikutnya yang mengalami peningkatan integrasi perdagangan cukup besar adalah Philipina, Philipina tercatat mengalami peningkatan lebih dari seratus persen dibandingkan dengan masa awal diberlakukannya AFTA yang sebesar 9,06 ditahun 1993 menjadi 20,02 di tahun 2006. Peningkatan persentase keterbukaan Philipina dalam skema AFTA ini merupakan yang terbesar dibandingkan 4 negara lain dalam penelitian ini.

Berbeda dengan Thailand dan Malaysia, kedua negara ini mengalami peningkatan keterbukaan yang jauh lebih rendah dibandingkan Philipina dan Indonesia. Thailand pada awal skema AFTA mencatat keterbukaan perdagangan dengan ASEAN sebesar 14,73 di tahun 1993 menjadi 20,39 ditahun 2006. Sedangkan Malaysia yang pada masa awal skema AFTA mencatat keterbukaan perdagangan dengan ASEAN sebesar 24,34 di tahun 1993 menjadi hanya 27,33 di tahun 2003. Meskipun Malaysia mencatat peningkatan keterbukaan perdagangan dalam skema AFTA yang kecil, Malaysia memiliki tingkat keterbukaan yang paling besar ke ASEAN dibandingkan dengan 4 negara lain dalam penelitian ini, baik itu pada awal diberlakukannya AFTA tahun 1993 hingga periode dalam skema AFTA tahun 2006.

Tidak semua negara ASEAN mengalami peningkatan keterbukaan perdagangan dengan ASEAN pada periode dalam skema AFTA. Singapura merupakan satu-satunya negara yang mengalami penurunan tingkat integrasi perdagangan dengan ASEAN. Mengawali AFTA di tahun 1993, singapura mencatatkan tingkat keterbukaan perdagangan dengan ASEAN sebesar 20,46 persen (terbesar kedua setelah Malaysia), pada tahun 2006 Singapura mencatatkan tingkat

keterbukaan perdagangan dengan ASEAN sebesar 18,05 persen (yang terendah diantara 4 negara lain dalam penelitian ini). Secara keseluruhan, mulai dari awal periode AFTA tahun 1993 hingga periode dalam skema AFTA tahun 2006, Singapura mengalami penurunan tingkat keterbukaan hampir 2,5 persen.

4.3.2. Integrasi Perdagangan dengan Pendekatan Harga

4.3.2.1 *Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test*

Penelitian ini menggunakan deviasi dari nilai depresiasi kurs dan diferensial inflasi antar 2 negara sebagai variabel utama untuk menganalisis ada tidaknya integrasi perdagangan di 5 negara utama ASEAN (Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand dan Philipina). Dengan sampel data bulanan (*monthly*) periode penelitian adalah dalam skema AFTA (1993-2006), dan berikut ini adalah ringkasan hasil uji ADF pada periode tersebut berdasarkan persamaan 13 berikut:

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \gamma Y_{t-1} + \sum_{i=1}^m \alpha_i \Delta Y_{t-1} + U_t \quad \dots\dots\dots(13)$$

Tabel 4.2 berikut memperlihatkan adanya integrasi perdagangan pada periode dalam skema AFTA antara 5 negara utama ASEAN yang ditunjukkan dengan stasionernya data pada derajat signifikan 1% (*MacKinnon Criteria*) dengan rincian, nilai t-statistik Indonesia dengan Malaysia sebesar -6.445777, Indonesia dengan Philipina sebesar -7.075443, Indonesia dengan Singapura sebesar -6.224210 dan, Indonesia dengan Thailand sebesar -6.605131. Sedangkan Malaysia dengan Philipina -11.77616, Malaysia dengan Thailand sebesar -10.88678, Malaysia dengan Singapura

-13.01962. Singapura dengan Philipina -11.59742, Singapura dengan Thailand -11.82366, dan Philipina dengan Thailand sebesar -10.59987.

Tabel 4.3

ADF Test Deviasi Depresiasi Kurs dan Diferensial Inflasi ASEAN 5

Periode Setelah Persetujuan APT: 2000 – 2006

No	Integrasi Perdagangan	<i>t-statistik</i>	<i>Mean</i>
1	Indonesia dengan Malaysia	-6.445777*	-0.776772
2	Indonesia dengan Philipina	-7.075443*	-0.496793
3	Indonesia dengan Singapura	-6.224210*	-0.911708
4	Indonesia dengan Thailand	-6.605131*	-0.689506
5	Malaysia dengan Philipina	-11.77616*	0.280062
6	Malaysia dengan Thailand	-10.88678*	0.087696
7	Malaysia dengan Singapura	-13.01962*	-0.135225
8	Singapura dengan Philipina	-11.59742*	0.415481
9	Singapura dengan Thailand	-11.82366*	0.223174
10	Philipina dengan Thailand	-10.59987*	0.196856

*MacKinnon (1996) Test Critical Value 1%

Kekuatan integrasi perdagangan dapat dilihat berdasarkan nilai absolut rata-rata dari deviasi nilai PPP (*Purchasing Power Parity*) sebagaimana tercatat dalam tabel semakin mendekati 0 nilai absolut rata-rata maka dapat dikatakan semakin kuat integrasi yang dialami oleh 2 negara tersebut. Dalam tabel 4.2 di atas, integrasi perdagangan terkuat dimiliki oleh Malaysia dengan Thailand dengan nilai *mean* 0.087696. Diikuti oleh Malaysia dengan Singapura dengan nilai *mean* -0.135225, Philipina dengan Thailand dengan nilai *mean* 0.196856.

4.4 Pembahasan

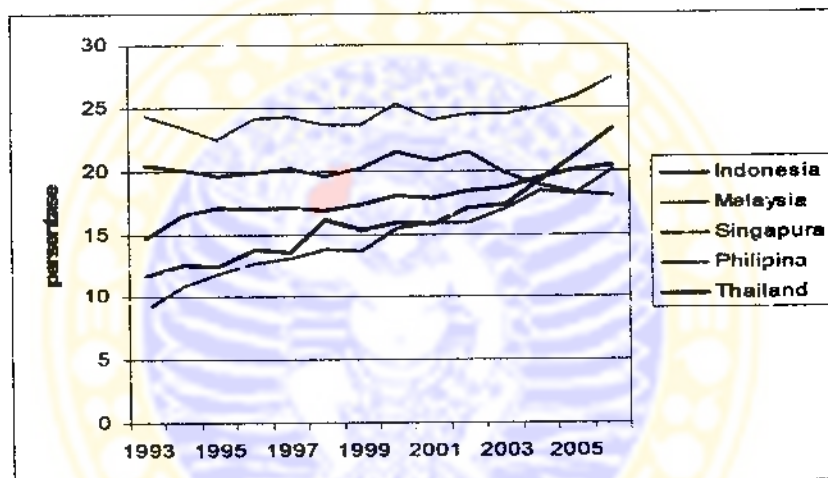
Setelah dimulainya AFTA pada Januari 1993, dapat dilihat pada grafik 4.2 berikut bahwa secara keseluruhan trend keterbukaan perdagangan antar ASEAN 5 cenderung meningkat. Indonesia yang sebelumnya berada pada 11.75 menjadi 23.26, Philipina yang sebelumnya pada 9.06 menjadi 20.02. begitu juga dengan Malaysia dan Thailand. Penurunan hanya terjadi pada Singapura yang sebelumnya berada pada 20.46 menjadi 18.05. Disisi lain, walaupun trend keterbukaan perdagangan intra ASEAN menjadi lebih baik setelah dimulainya AFTA, persentase keterbukaan perdagangan intra ASEAN yang ada masih lebih rendah dibandingkan keterbukaan perdagangan negara-negara ASEAN terhadap dunia. Hal ini bisa terjadi karena hampir semua negara-negara ASEAN menghasilkan produk-produk yang sama, maka terjadi persaingan yang ketat antar sesama mereka sehingga keberadaan kerjasama perdagangan ASEAN tidak terlalu berarti bagi peningkatan volume perdagangan di dalam ASEAN.

Dari grafik berikut juga dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 Malaysia yang merupakan negara anggota ASEAN dengan tingkat keterbukaan perdagangan tertinggi antar negara-negara ASEAN hanya memiliki tingkat keterbukaan perdagangan sebesar 27% dari total perdagangannya terhadap dunia. Negara-negara ASEAN lebih memiliki pangsa perdagangan dari belahan dunia lain daripada negara-negara anggota ASEAN yang lain. Bahkan, menurut Quang (2003) dalam penelitiannya mengenai integrasi perdagangan ASEAN, untuk Malaysia tersebut hanya 3% dari eksportnya ke ASEAN yang diikuti sertakan dalam *Common Effective*

Preferential Tariff (CEPT). Demikian juga negara-negara anggota lainnya, hanya sebagian kecil dari eksportnya ke ASEAN yang masuk dalam skem pengurangan tarif tersebut.

Grafik 4.2

**Trend Keterbukaan Perdagangan ASEAN 5 Terhadap ASEAN
Periode Dalam Skema AFTA (1993 – 2006)**



Disisi lain, berdasarkan pendekatan harga yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.3, terlihat melalui stasionernya data PPP pada *Critical Value* 1% bahwa ASEAN 5 terintegrasi secara perdagangan antar satu sama lain, dan juga memiliki kekuatan integrasi yang cukup baik berdasarkan nilai *mean* yang mendekati 0 (nol). Terjadinya integrasi perdagangan berdasarkan pendekatan harga selain ditentukan oleh intensitas perdagangan antar negara juga ditentukan oleh kesamaan kondisi serta kebijakan moneter antar negara. Berdasarkan konsep PPP yang merupakan pengembangan dari konsep *The Law of One Price*, bahwa semakin berkurangnya

hambatan perdagangan antar negara ASEAN maka perbedaan harga barang antar negara pun akan menuju ke arah yang sama (nol). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Amrita (2005) mengenai konvergensi inflasi antar 5 negara ASEAN dalam skema AFTA, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat inflasi di ASEAN bersifat konvergen (memiliki kesamaan arah menuju ke satu titik).

Terjadinya konvergensi inflasi itu sendiri tidak lepas dari peran serta beberapa faktor antara lain tingginya mobilitas faktor, eratnya integrasi perdagangan, dan kemiripan kebijakan moneter antar negara. Mobilitas tenaga kerja dan modal yang tinggi mendorong terciptanya kesetaraan harga faktor di antara negara ASEAN. Guncangan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara tersebut pun seringkali serupa, hal ini dikarenakan adanya kemiripan struktur ekonomi yaitu sebagian besar adalah wilayah padat tenaga kerja dan sumber daya alam yang lebih menekankan pada *labour-intensive production*. Akibatnya kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh suatu negara anggota pun tidak jarang sangat mirip dengan kebijakan yang diadopsi oleh anggota ASEAN lainnya.

ASEAN sangat berpotensi meraih keuntungan mengadakan integrasi internal, seperti dipaparkan sebelumnya pada Bab 2 bahwa salah satu keuntungan Integrasi Ekonomi menurut Jhingan⁴ adalah meningkatkan efisiensi ekonomi dalam kelompok yang berintegrasi dengan menciptakan kompetisi yang lebih ketat diantara anggotanya. Tiap negara anggota terdorong untuk berinovasi dan mengadopsi metode

⁴ Jhingan, M.L. 2001. *International Economics*, Fifth Revised and Enlarge Edition, Delhi: Vrinda Publication (P) LTD, India.

baru dalam memproduksi. Hal itu meningkatkan efisiensi teknis produksinya dan terus mendorong pengeluaran investasi pada peralatan dan mesin baru. Sebagai hasilnya, biaya produksi menurun, sedangkan output, tenaga kerja, dan pendapatan meningkat seiring dengan terjadinya ekspansi perdagangan dalam blok perdagangan tersebut. Standard hidup masyarakat negara-negara anggota juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya ketersediaan produk dengan harga yang lebih murah, lapangan kerja, dan pendapatan.

Untuk menghadapi tantangan global yang menuntut perekonomian suatu negara lebih maju, diperlukan hubungan perekonomian yang lebih erat antar negara-negara ASEAN. Semakin besar hubungan ekonomi ASEAN, akan meningkatkan kualitas persaingan produksi negara-negara ASEAN di pasar internasional dan membuat pasar ASEAN menjadi lebih menarik (Hew, 2000). Dengan program reformasi ekonomi domestik di semua negara ASEAN dan perluasan kesempatan sektor swasta, ASEAN akan mendapatkan kerjasama ekonomi yang lebih mudah dibanding sebelumnya (Cheung, 2003).

Meningkatnya peranan sektor industri yang dicapai seluruh negara ASEAN menyebabkan berkurangnya hambatan perdagangan dan investasi. Sehingga ASEAN menjadi salah satu wilayah yang mempunyai prospek yang baik dalam kerjasama ekonomi. ASEAN sebagai suatu organisasi regional mengalami peningkatan impresif dan berhasil membina kerjasama ekonomi. Adanya kerjasama ekonomi tersebut menciptakan kawasan ASEAN menjadi makmur dan stabil, sehingga mendukung kelanjutan pembangunan di masing-masing negara anggotanya (Hiro Lee, 2005).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini :

1. Uji integrasi perdagangan berdasarkan pendekatan kuantitas dengan persamaan pada penelitian Jong Il-Choe (2001) menemukan bahwa negara-negara ASEAN 5 saling terintegrasi perdagangan satu sama lain, hanya saja integrasi perdagangan intra-ASEAN ini nilainya tidak terlalu besar dibandingkan integrasi perdagangan negara-negara ASEAN 5 dengan negara-negara lain diluar ASEAN (*rest of world*). Hal ini bisa terjadi karena negara-negara ASEAN lebih memiliki pangsa perdagangan dari belahan dunia lain daripada negara-negara anggota ASEAN yang lain (*market driven*). Permintaan atas barang-barang yang diproduksi negara-negara ASEAN lebih didominasi oleh Amerika Serikat dan Jepang daripada negara-negara ASEAN sendiri. Di sisi lain, kurangnya komitmen negara-negara anggota ASEAN dalam *scheme* AFTA. Sebagai contoh, pada tahun 2006 Malaysia yang merupakan negara anggota ASEAN dengan tingkat keterbukaan perdagangan tertinggi antar negara-negara ASEAN hanya memiliki tingkat keterbukaan perdagangan sebesar 27% dari total perdagangannya terhadap dunia. Bahkan menurut Quang (2003) dalam penelitiannya mengenai integrasi perdagangan ASEAN,

untuk Malaysia tersebut hanya 3% dari eksportnya ke ASEAN yang diikuti sertakan dalam *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)*.

2. Uji stasioneritas integrasi perdagangan berdasarkan pendekatan harga menggunakan metode ADF menemukan bahwa negara-negara ASEAN-5 terintegrasi perdagangan satu sama lain. Hasil uji dengan metode ADF ini menunjukkan tingkat integrasi yang kuat antar lima negara ASEAN dalam penelitian ini. Integrasi perdagangan berdasarkan pendekatan harga juga ditentukan oleh intensitas perdagangan dan kesamaan kondisi serta kebijakan moneter antar negara. Hasil penelitian Amrita (2005) mengenai konvergensi inflasi antar 5 negara ASEAN dalam skema AFTA menyatakan bahwa tingkat inflasi di ASEAN bersifat konvergen (memiliki kesamaan arah menuju ke satu titik). Terjadinya konvergensi inflasi itu sendiri tidak lepas dari peran serta beberapa faktor antara lain tingginya mobilitas faktor, eratnya integrasi perdagangan, dan kemiripan kebijakan moneter antar negara. Mobilitas tenaga kerja dan modal yang tinggi mendorong terciptanya kesetaraan harga faktor di antara negara ASEAN. Guncangan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara tersebut pun seringkali serupa, hal ini dikarenakan adanya kemiripan struktur ekonomi yaitu sebagian besar adalah wilayah padat tenaga kerja dan sumber daya alam yang lebih menekankan pada *labour-intensive production*. Akibatnya kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh suatu negara anggota pun tidak jarang sangat mirip dengan kebijakan yang diadopsi oleh anggota ASEAN lainnya.

5.2 Saran

Perlu diingat bahwa manfaat integrasi antara kedua wilayah tersebut sangatlah nyata sehingga sangat relevan jika integrasi tersebut terus ditingkatkan meskipun hal ini tidak mudah untuk dilakukan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Berikut ini beberapa saran penulis yang diharapkan dapat berguna di masa mendatang:

1. Secara nyata dapat terlihat bahwa 5 negara ASEAN terintegrasi dalam bidang perdagangan berdasarkan pendekatan kuantitas dengan nilai yang kecil. Hal ini menunjukkan pentingnya kesepakatan AFTA untuk lebih fokus pada masalah kerjasama perdagangan internal ASEAN. Kurangnya integrasi perdagangan antar negara ASEAN 5 mungkin juga disebabkan karena negara di ASEAN lebih intensif berinteraksi dalam bidang perdagangan dengan US, Eropa atau negara-negara Asia Timur seperti China dan Jepang daripada antar sesamanya, namun tentunya hipotesis ini perlu dibuktikan dalam penelitian lebih lanjut.
2. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan nilai integrasi perdagangan dengan pendekatan harga yang lebih ditentukan oleh kemiripan kondisi negara dan kebijakan moneter maka perlu adanya peningkatan kerjasama moneter di negara-negara ASEAN. Hal ini selain dapat mengendalikan resiko guncangan ekonomi yang mungkin dihadapi oleh negara-negara ASEAN juga dapat lebih mempererat integrasi ekonominya. Untuk menjawab kerjasama moneter seperti apakah yang dapat dilakukan tentunya memerlukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- , International Financial Statistics (IFS). 2006. *International Monetary Fund*, <http://ifs.apdi.net>.
- Amrita, Frita. 2005. *Konvergensi Inflasi dan Optimum Currency Area (OCA) Di Antara Negara Asean Sebelum dan Dalam Skema AFTA*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya
- Baele, Lieven, et al. 2004. *Measuring Financial Integration In The Euro Area*. No. 14/April 2004. European Central Bank. [Http://www.Ecb.Int](http://www.Ecb.Int)
- Budhi, Rizky Satya. 2006. *Integrasi Perdagangan dan Keuangan ASEAN Plus Three*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya
- Bustelo, Pablo. 1998. *European and Asia-Pacific Integration: Political, Security, and Economic Perspectives*. Printed in Y.-M. Shaw (ed.), IIR English Series, No. 50, IIR, Taipei, 1998, pp. 85-97.
- Carbaugh, Robert J. 2002. *International Economics*, Eight Edition, United States of America: South-Western.
- Chcung, Yin-Wong, Mcnzic D. Chinn, dan Eiji Fujii. 2003. *The Chinese Economies in Global Context: The Integration Process and Its Determinants*. National Bureau and Economic Research (NBER) Working Paper 10047 <http://www.nber.org/papers/w10047>
- , 2006. *The Chinese economies in global context: The integration process and its determinants*. *Journal of the Japanese International Economics* 20 128–153. www.elsevier.com/locate/jjie
- Dornbusch, Rudiger. 2002. *Makro Ekonomi*, Jakarta: Media Global Edukasi, Indonesia.
- Eviews 4.1 User's Guide
- Frolova, Nina. 2004. *ASEAN+3 Free Trade Area: Will Japan Benefit from It?*. Paper for the 16th MEA Convention on December 9, 2004 and the 29th Conference of the Federation of ASEAN Economic Associations (FAEA) December 10-11, 2004, Renaissance Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia

- Hew, Denis dan Mely C. Anthony. 2000. *ASEAN and ASEAN+3 in Postcrisis Asia*. NIRA Review Essay
- Hill, R. Carter, William E. Griffiths, George G. Judge. 2001. *Under Graduate Econometrics*, Second Edition, United States of America: John Wiley & Sons.
- Hiro Lee. 2005. *Free Trade Agreements and Sectoral Adjustments in East Asia*. Dominique van der Mensbrughe, The World Bank, Washington DC, USA
- Il-Choe, Jong. 2001. *An impact of economic integration through trade: on business cycles for 10 East Asian countries*. Journal of Asian Economics 12 (2001) 569–586
- Jhingan, M.L. 2001. *International Economics*, Fifth Revised and Enlarge Edition, Delhi: Vrinda Publication (P) LTD, India.
- Kim, Soyoung, Jong-Wha Lee dan Kwanho Shin. 2005. *Regional and Global Financial Integration in East Asia*. paper was presented at the Workshop on Global Imbalances and Asian Financial Markets, September 29-30, 2005, UC Berkeley
- Koedijk, Kees G. 2004. *Purchasing power parity and the euro area*. Journal of International Money and Finance (JIMF) 23 (2004) 1081–1107. www.sciencedirect.com
- Krugman, Paul R., Maurice Obstfeld. 2000. *International Economics: Theory and Policy*, Fifth Edition, United States of America: Pearson Addison-Wesley.
- Laurenceson, James. 2003. *Economic Integration Between China And Asean*, Discussion Paper No 329, Brisbane: The University of Queensland, Australia
- Lothian, James R. 2005. *Institutions, Capital Flows and Financial Integration*. Conference on Emerging Markets Finance London, May 5-6, 2005. Journal of International Money and Finance (JIMF)
- Nopirin. 1999. *Ekonomi Internasional*, Edisi ketiga, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, Indonesia.
- Rumayya. 2004. *Analisis Hubungan FDI dan Perdagangan Internasional Dengan Model Persamaan Gravitasi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya

- Salvatore, Dominick. 1997. *Ekonomi Internasional*, Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga, Indonesia.
- Samuelson, P. A dan William D. Nordhaus. 1992. *Makro Ekonomi*. Edisi keempatbelas. Jakarta: Erlangga, Indonesia.
- Soesastro, Hadi. 2003. *An ASEAN Community and ASEAN+3: How do They fit Together*. Pacific Economic Paper No 338. Australia-Japan Research Centre. Asia Pacific school of Economics and Government
- Tambunan, Tulus. 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Van Hoa, Tran. 2003. *New Asian Regionalism: Evidence on ASEAN+3 Free Trade Agreement From Extended Gravity Theory and New Modelling Approach*. Economics Working Paper Series. University of Wollongong. <http://www.uow.edu.au/commerce/econ/wplist.html>
- Walter, Ingo. 1975. *International Economics*, The Ronald Press Company, New York
- www.aseansec.org

LAMPIRAN I

Integrasi Perdagangan Berdasarkan Pendekatan Harga

1. Indonesia dengan Malaysia

Null Hypothesis: IND_MAL01 has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.445777	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.016433	
5% level	-3.438154	
10% level	-3.143345	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(IND_MAL01)

Method: Least Squares

Date: 07/01/07 Time: 44:52

Sample(adjusted): 1993:03 2006:06

Included observations: 160 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IND_MAL01(-1)	-0.417650	0.064794	-6.445777	0.0000
C	-0.325744	0.221654	-1.469610	0.1437
@TREND(1993:01)	0.000110	0.002296	0.047967	0.9618
R-squared	0.209273	Mean dependent var		0.008747
Adjusted R-squared	0.199200	S.D. dependent var		1.498965
S.E. of regression	1.341385	Akaike info criterion		3.443855
Sum squared resid	282.4923	Schwarz criterion		3.501514
Log likelihood	-272.5084	F-statistic		20.77567
Durbin-Watson stat	2.024514	Prob(F-statistic)		0.000000

2. Indonesia dengan Philipina

Null Hypothesis: IND_PHI01 has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-7.075443	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.016433	
5% level	-3.438154	
10% level	-3.143345	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(IND_PHI01)

Method: Least Squares

Date: 07/01/07 Time: 14:54

Sample(adjusted): 1993:03 2006:06

Included observations: 160 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IND_PHI01(-1)	-0.482754	0.068230	-7.075443	0.0000
C	-0.212460	0.238072	-0.892420	0.3735
@TREND(1993:01)	-0.000210	0.002517	-0.083242	0.9338
R-squared	0.241776	Mean dependent var		0.012878
Adjusted R-squared	0.232118	S.D. dependent var		1.678217
S.E. of regression	1.470603	Akaike info criterion		3.627795
Sum squared resid	339.5399	Schwarz criterion		3.685454
Log likelihood	-287.2236	F-statistic		25.03147
Durbin-Watson stat	2.073810	Prob(F-statistic)		0.000000

3. Indonesia dengan Singapura

Null Hypothesis: IND_SING01 has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.224210	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.016433	
5% level	-3.438154	
10% level	-3.143345	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(IND_SING01)

Method: Least Squares

Date: 07/01/07 Time: 14:55

Sample(adjusted): 1993:03 2006:06

Included observations: 160 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IND_SING01(-1)	-0.393628	0.063241	-6.224210	0.0000
C	-0.344630	0.235774	-1.461698	0.1458
@TREND(1993:01)	-2.55E-05	0.002432	-0.010492	0.9916
R-squared	0.197962	Mean dependent var		0.013533
Adjusted R-squared	0.187744	S.D. dependent var		1.576359
S.E. of regression	1.420697	Akaike info criterion		3.558744
Sum squared resid	316.8857	Schwarz criterion		3.616404

Log likelihood	-281.6995	F-statistic	19.37560
Durbin Watson stat	2.038966	Prob(F-statistic)	0.000000

4. Indonesia dengan Thailand

Null Hypothesis: IND_THA01 has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.605131	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.016433	
5% level	-3.438154	
10% level	-3.143345	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(IND_THA01)

Method: Least Squares

Date: 07/01/07 Time: 14:56

Sample(adjusted): 1993:03 2006:06

Included observations: 160 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IND_THA01(-1)	-0.434405	0.065768	-6.605131	0.0000
C	-0.282237	0.233481	-1.208820	0.2285
@TREND(1993:01)	-0.000140	0.002446	-0.057044	0.9546
R-squared	0.217463	Mean dependent var		0.006819
Adjusted R-squared	0.207494	S.D. dependent var		1.604994
S.E. of regression	1.428810	Akaike info criterion		3.570133
Sum squared resid	320.5153	Schwarz criterion		3.627793
Log likelihood	-282.6107	F-statistic		21.81473
Durbin-Watson stat	2.038509	Prob(F-statistic)		0.000000

5. Malaysia dengan Philipina

Null Hypothesis: MAL_PHI01 has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-11.77616	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.016433	
5% level	-3.438154	
10% level	-3.143345	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(MAL_PHI01)
 Method: Least Squares
 Date: 07/03/07 Time: 18:20
 Sample(adjusted): 1993:03 2006:06
 Included observations: 160 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MAL_PHI01(-1)	-0.939509	0.079781	-11.77616	0.0000
C	0.325203	0.101265	3.211423	0.0016
@TREND(1993:01)	-0.000743	0.001042	-0.712539	0.4772
R-squared	0.469021	Mean dependent var		0.004133
Adjusted R-squared	0.462257	S.D. dependent var		0.828580
S.E. of regression	0.607606	Akaike info criterion		1.859990
Sum squared resid	57.96197	Schwarz criterion		1.917650
Log likelihood	-145.7992	F-statistic		69.34022
Durbin-Watson stat	1.998574	Prob(F-statistic)		0.000000

6. Malaysia dengan Singapura

Null Hypothesis: MAL_SING01 has a unit root
 Exogenous: Constant, Linear Trend
 Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-13.01962	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.016433	
5% level	-3.438154	
10% level	-3.143345	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(MAL_SING01)
 Method: Least Squares
 Date: 07/03/07 Time: 18:23
 Sample(adjusted): 1993:03 2006:06
 Included observations: 160 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MAL_SING01(-1)	-1.032011	0.079266	-13.01962	0.0000
C	-0.125458	0.071148	-1.763335	0.0798
@TREND(1993:01)	-0.000125	0.000751	-0.166611	0.8679
R-squared	0.519193	Mean dependent var		0.004785
Adjusted R-squared	0.513068	S.D. dependent var		0.628605
S.E. of regression	0.438644	Akaike info criterion		1.208314
Sum squared resid	30.20811	Schwarz criterion		1.265973

Log likelihood	-93.66509	F-statistic	84.76711
Durbin-Watson stat	1.987277	Prob(F-statistic)	0.000000

7. Malaysia dengan Thailand

Null Hypothesis: MAL_THA01 has a unit root
 Exogenous: Constant, Linear Trend
 Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-10.88678	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.016433	
5% level	-3.438154	
10% level	-3.143345	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(MAL_THA01)
 Method: Least Squares
 Date: 07/03/07 Time: 18:24
 Sample(adjusted): 1993:03 2006:06
 Included observations: 160 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
MAL_THA01(-1)	-0.860001	0.078995	-10.88678	0.0000
C	0.118411	0.080343	1.473815	0.1425
@TREND(1993:01)	-0.000545	0.000851	-0.640995	0.5225
R-squared	0.430175	Mean dependent var		-0.001928
Adjusted R-squared	0.422916	S.D. dependent var		0.653048
S.E. of regression	0.496095	Akaike info criterion		1.454473
Sum squared resid	38.63929	Schwarz criterion		1.512132
Log likelihood	-113.3578	F-statistic		59.26164
Durbin-Watson stat	1.993294	Prob(F-statistic)		0.000000

8. Singapura dengan Philipina

Null Hypothesis: SING_PHI01 has a unit root
 Exogenous: Constant, Linear Trend
 Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-11.59742	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.016433	
5% level	-3.438154	
10% level	-3.143345	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(SING_PHI01)

Method: Least Squares

Date: 07/03/07 Time: 18:25

Sample(adjusted): 1993:03 2006:06

Included observations: 160 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SING_PHI01(-1)	-0.922885	0.079577	-11.59742	0.0000
C	0.430415	0.120388	3.575235	0.0005
@TREND(1993:01)	-0.000606	0.001220	-0.496424	0.6203
R-squared	0.461441	Mean dependent var		-0.000653
Adjusted R-squared	0.454581	S.D. dependent var		0.963698
S.E. of regression	0.711715	Akaike info criterion		2.176295
Sum squared resid	79.52659	Schwarz criterion		2.233954
Log likelihood	-171.1036	F-statistic		67.25942
Durbin-Watson stat	1.992591	Prob(F-statistic)		0.000000

9. Singapura dengan Thailand

Null Hypothesis: SING_THA01 has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-11.82366	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.016433	
5% level	-3.438154	
10% level	-3.143345	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(SING_THA01)

Method: Least Squares

Date: 07/03/07 Time: 18:27

Sample(adjusted): 1993:03 2006:06

Included observations: 160 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
SING_THA01(-1)	-0.934279	0.079018	-11.82366	0.0000
C	0.241693	0.082987	2.912416	0.0041
@TREND(1993:01)	-0.000473	0.000856	-0.553225	0.5809
R-squared	0.471075	Mean dependent var		-0.006713
Adjusted R-squared	0.464337	S.D. dependent var		0.681793
S.E. of regression	0.498997	Akaike info criterion		1.466140
Sum squared resid	39.09275	Schwarz criterion		1.523800

Log likelihood	-114.2912	F-statistic	69.91422
Durbin-Watson stat	1.988335	Prob(F-statistic)	0.000000

10. Thailand dengan Philipina

Null Hypothesis: THA_PHI01 has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-10.59987	0.0000
Test critical values:		
1% level	-4.016433	
5% level	-3.438154	
10% level	-3.143345	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(THA_PHI01)

Method: Least Squares

Date: 07/03/07 Time: 18:28

Sample(adjusted): 1993:03 2006:06

Included observations: 160 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
THA_PHI01(-1)	-0.834940	0.078769	-10.59987	0.0000
C	0.175502	0.110889	1.582681	0.1155
@TREND(1993:01)	-9.59E-05	0.001171	-0.081853	0.9349
R-squared	0.417132	Mean dependent var		0.006163
Adjusted R-squared	0.409707	S.D. dependent var		0.890512
S.E. of regression	0.684185	Akaike info criterion		2.097396
Sum squared resid	73.49321	Schwarz criterion		2.155056
Log likelihood	-164.7917	F-statistic		56.17883
Durbin-Watson stat	1.971340	Prob(F-statistic)		0.000000

Lampiran 2

Integrasi Perdagangan Berdasarkan Pendekatan Kuantitas

1. Indonesia

	trade ij	trade i*	Rij
1993	7655.972	65153	11.75065
1994	9025.047	72042.1	12.52746
1995	10694.9	86072	12.42552
1996	12794.66	92743	13.79583
1997	14531.01	107604	13.50416
1998	13854.58	85648	16.17618
1999	12922.22	84565	15.28082
2000	17352.78	108999	15.92013
2001	14970.83	94894	15.77637
2002	16700.69	97476	17.13313
2003	18455.24	106354	17.35266
2004	24435.81	127042	19.23444
2005	32864.49	155725	21.10418
2006	37513.44	161265.6	23.2619

2. Malaysia

	trade ij	trade i*	Rij
1993	22584.97	92786.18	24.34087
1994	27731	118434.3	23.41468
1995	34001.12	151686.1	22.41545
1996	37815.66	156725.4	24.12861
1997	38336.8	157865.7	24.28444
1998	31089.51	131622.8	23.62016
1999	35483.63	150021.9	23.6523
2000	45811.78	180433.6	25.38983
2001	38840.96	161836.2	24.00018
2002	42564.59	173975.9	24.4658
2003	46235.78	188586.4	24.51703
2004	57928.2	231793.9	24.99125
2005	66028.16	255604.6	25.83215
2006	74785	273671.6	27.32655

3. Singapura

	trade ij	trade i*	Rij
1993	32582.06	157245.6	20.46026
1994	40118.08	199496.2	20.1097
1995	47566.36	242775.7	19.59272
1996	50999.12	256351.3	19.89424
1997	51906.03	257423	20.16371
1998	41995.55	214614.5	19.5679
1999	45536.62	225740.3	20.17213
2000	58688.83	272350.5	21.54901
2001	49457.73	237751.3	20.8023
2002	51930.41	241627.9	21.49189
2003	54060.2	272116.1	19.86659
2004	65034.26	343469.9	18.93449
2005	78802.9	429696.3	18.33921
2006	88446.31	490076.8	18.04744

4. Philipina

	trade ij	trade i*	Rij
1993	2704.26	29843.06	9.061604
1994	3901.085	35849.55	10.88182
1995	5446.377	45838.57	11.88165
1996	6938.164	54538.72	12.72154
1997	8243.318	63364.67	13.00933
1998	8242.376	60121.13	13.70962
1999	9434.23	69130.12	13.64706
2000	11329.28	73591.15	15.39489
2001	10093.72	63464.71	15.90446
2002	11348.83	71343.23	15.90736
2003	12805.46	75537.65	16.95242
2004	15060.19	81942.76	18.37892
2005	16004.74	87939.09	18.1998
2006	18511.93	92449.96	20.02373

5. Thailand

	trade ij	trade i*	Rij
1993	12177.93	82697.4	14.7259
1994	16483.19	99720.25	16.52943
1995	21696.95	127225.8	17.0539
1996	21708.55	128052.3	16.95287
1997	20613.52	120198.5	17.14957
1998	16377.72	97447.48	16.80672
1999	18849.6	108822.5	17.32141
2000	23645.91	130885.9	18.06605
2001	22597.48	126878.7	17.8103
2002	24448.94	132753.5	18.4168
2003	29165.53	156147.9	18.67814
2004	37076.68	190658.2	19.44668
2005	45847.71	228301.6	20.08208
2006	49891.86	244739.9	20.38567